



**SKRIPSI**

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN UKURAN PERUSAHAAN  
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN SEKTOR  
PERBANKAN SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA  
TAHUN 2017-2021**

**OLEH**

**NAMA : ALDI SYAHPUTRA**

**NIM : 181000262201013**

**PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT**

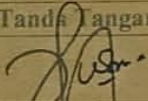


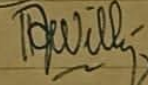
**2023**

## PENGESAHAN

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Tanggal 28 Februari 2023

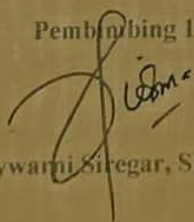
Judul : Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Ukuran  
Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Pada  
Perusahaan Sektor Perbankan Syariah Yang Terdaftar  
Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021  
Nama : Aldi Syahputra  
NIM : 181000262201013  
Program Studi : Akuntansi

### Tim penguji

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Liesma Maywarni Siregar, SE,M.Si,Ak,CA	Ketua	
2.	Rina Widyanti, SE,M.Si	Anggota	
3.	Puguh Setiawan, SE,M.Si	Anggota	
4.	Dr. Willy Nofranita, SE,M.Si,Ak,CA	Anggota	

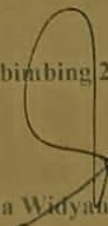
Disetujui :

Pembimbing 1



(Liesma Maywarni Siregar, SE,M.Si,Ak,CA)

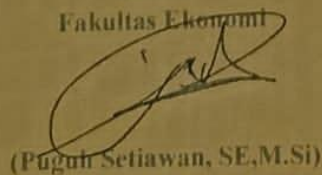
Pembimbing 2



(Rina Widyanti, SE,M.Si)

Diketahui :

Dekan  
Fakultas Ekonomi



(Puguh Setiawan, SE,M.Si)

Ketua  
Prodi Akuntansi



(Itri Xufianis, SE,M.Si)

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Padang, 10 Maret 2023



Atar Svahputra  
18.100.012.622.01.013

## HAK CIPTA

Hak cipta milik Aldi Syahputra, tahun 2023, dilindungi oleh undang-undang. Yaitu dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, baik cetak, fotokopi, mikro film dan lain-lain sebagainya

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021”. Skripsi ini adalah salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini saya tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat saya atasi berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu saya ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Riki Saputra, M.A selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
2. Ibu Liesma Maywarni Siregar SE., M.Si, Ak, CA selaku dosen pembimbing I yang sabar dalam meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, bantuan dorongan dalam menggunakan aplikasi pengolahan data terbaru serta arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Ibu Rina Widyanti SE., M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi serta arahan dalam penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Bapak Puguh Setiawan, SE,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammdiyah Sumatera barat.
5. Ibu Fitri Yulianis, SE.M.Si selaku Kaprodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
6. Bapak Puguh Setiawan SE., M.Si selaku dosen penguji I dan Ibu Dr. Willy Nofranita SE.,M.Si, Ak, CA selaku dosen penguji II yang telah memberikan nasehat dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Unversitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah memberikan ilmu serta motivasi dalam pengerjaan skripsi ini.
8. Yang paling teristimewa untuk kedua orang tua saya Ayah Afrizal dan Ibu Martina yang telah memberikan saya arahan, bimbingan, serta doa untuk saya dalam mengerjakan skripsi. Segala perjuangan saya sampai titik ini saya persembahkan pada kedua orang tua yang paling sangat berharga bagi hidup saya.
9. Kakak dan abang yang telah memberikan semangat, motivasi bahkan finansial telah mereka penuhi sampai akhir skripsi ini.
10. Ponakan yang telah membantu memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
11. Teman- teman Akuntansi 2018 yang telah memberikan arahan, semangat berjuang kepada saya.
12. Semua pihak terkait dalam proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan serta dalam penambahan ilmu pengetahuan.

Padang, 05 Februari 2023

Penulis,

Aldi Syahputra



PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERBANKAN SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017-2021

ALDI SYAHPUTRA

NIM: 18100262201013

Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [alsptr8765@gmail.com](mailto:alsptr8765@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan. Penerapan GCG dan ukuran perusahaan diharapkan akan mendukung pertumbuhan kinerja keuangan yang baik.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan syariah dan perbankan konvensional yang mempunyai Unit Usaha Syariah (UUS) serta terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021 dengan sampel berjumlah 17 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Partial Least Square* (PLS) dengan Software SmartPls Versi 3.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa terdapat lima indikator pembentuk variabel *Good Corporate Governance* (GCG), dua indikator untuk pembentuk variabel ukuran perusahaan dan tiga indikator pembentuk indikator kinerja keuangan. Hasil olahan SEM-PLS menunjukkan bahwa GCG berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Namun sebaliknya ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan.

**Kata kunci: GCG, Ukuran Perusahaan dan Kinerja Keuangan**



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Kinerja Keuangan.....	8
2.1.1 Pengertian Kinerja .....	9
2.1.2 Pengertian Kinerja Keuangan .....	9
2.1.3 Tujuan Pengukuran dan Jenis Pengukuran Kinerja Keuangan .	10
2.1.4 Jenis-jenis Rasio Keuangan .....	11
2.2 <i>Good Corporate Governance</i> .....	21
2.2.1 Pengertian <i>Good Corporate Governance</i> .....	21
2.2.2 Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> .....	23
2.2.3 Tujuan dan Manfaat <i>Good Corporate Governance</i> .....	24
2.2.4 Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> .....	25
2.2.4.1 Dewan Komisaris Independen .....	25
2.2.4.2 Dewan Direksi .....	27
2.2.4.3 Kepemilikan Institusional .....	29
2.2.4.4 Komite Audit .....	32
2.2.4.5 Kepemilikan Manajerial .....	34
2.3 Ukuran Perusahaan .....	34
2.4 Penelitian Terdahulu .....	37
2.5 Kerangka Konseptual .....	44
2.6 Hipotesis .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Tempat dan Waktu penelitian .....	46
3.2 Populasi dan Sampel .....	46
3.2.1 Populasi .....	46
3.2.2 Sampel .....	46
3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel .....	47

3.3.1 Variabel Dependen .....	48
3.3.2 Variabel Independen.....	49
3.3.2.1 Variabel <i>Good Corporate Governance</i> .....	49
3.3.2.2 Variabel Ukuran Perusahaan .....	51
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	56
3.5 Teknik Analisis Data .....	56
3.5.1 Pengujian <i>Outer Model</i> .....	59
3.5.1.1 Uji Validitas Konvergen .....	60
3.5.1.2 Uji Validitas Diskriminan .....	60
3.5.1.3 Uji <i>Average Variance Extracted (AVE)</i> .....	60
3.5.1.4 Uji Reliabilitas .....	61
3.5.2 Pengujian <i>Inner Model</i> .....	61
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Hasil.....	63
4.1.1 Data Penelitian .....	63
4.1.2 Hasil Pengujian <i>Outer Model</i> .....	65
4.1.2.1 Hasil Pengujian Validitas Konvergen.....	66
4.1.2.2 Hasil Pengujian Validitas Diskriminan .....	67
4.1.2.3 Hasil Pengujian <i>Average Variance Extracted (AVE)</i> .....	68
4.1.2.4 Hasil Pengujian Reliabilitas .....	69
4.1.3 Hasil Pengujian <i>Inner Model</i> .....	70
4.2. Pembahasan .....	72
4.2.1 <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan	72
4.2.2 Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan .....	72
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Simpulan.....	74
5.2 Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	77
<b>LAMPIRAN</b> .....	85

**DAFTAR TABEL**

2.4 Penelitian Terdahulu .....	37
3.1 Kriteria Pemilihan Sampel.....	47
3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	53
4.1 Kriteria Pemilihan Sampel .....	63
4.2 Daftar Sampel Penelitian .....	64
4.3 Hasil Nilai <i>Loading Factor</i> .....	66
4.4 Hasil <i>Cross Loading</i> .....	67
4.5 Hasil Pengujian <i>Average Variance Extracted (AVE)</i> .....	68
4.6 Hasil Pengujian <i>Composite Reliability</i> .....	69
4.7 Hasil Pengujian <i>Cronbach Alpha</i> .....	70
4.8 Hasil <i>R-Square</i> .....	70
4.9 Hasil Uji <i>Path Coefficients</i> .....	71
5.0 Hasil Koefisien Jalur Struktural.....	71

**DAFTAR GAMBAR**

2.5 Kerangka Konseptual .....	44
4.2 Model Full Struktural .....	65

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Daftar Perbankan Di BEI Tahun 2017-2021 .....	85
Lampiran 2 Daftar Sampel Penelitian .....	88
Lampiran Tabulasi Data.....	90
Lampiran 3 Hasil Output Smartpls Versi 3 .....	127

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam praktek bisnis perbankan secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah yang menjadi perbedaan mendasar antara bank konvensional dan bank syariah adalah adanya larangan bunga dalam bank syariah sebagaimana sistem bunga yang dianut oleh bank konvensional, sehingga dalam kegiatan operasionalnya bank syariah menganut sistem bagi hasil. Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belum mendapatkan perhatian optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional.

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pada tanggal 16 Juli 2008. Perbankan syariah ditandai dengan adanya Bank Muamalat. Dengan seiring perkembangan waktu perbankan syariah di Indonesia sudah mulai berkembang. Dengan adanya perkembangan dalam dunia perbankan syariah menjadi acuan pada laporan keuangan sering dijadikan dasar untuk penilaian kinerja keuangan. Laporan laba rugi merupakan salah satu jenis laporan keuangan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan untuk satu periode tertentu. Angka laba yang dihasilkan dalam laporan laba rugi sering dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan, sehingga laba yang tinggi belum mencerminkan kas yang besar. Dalam hal ini arus kas mempunyai nilai lebih untuk menjamin kinerja keuangan perusahaan di masa mendatang. Arus kas (*cash flow*) menunjukkan hasil operasi yang dananya telah diterima perusahaan dan

dibebani oleh beban yang bersifat tunai serta benar-benar yang sudah dikeluarkan perusahaan.

Penilaian tingkat kinerja keuangan merupakan hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan, tak terkecuali perusahaan perbankan. Kinerja keuangan bank juga memiliki implikasi penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara yang dapat dilihat dari laporan keuangan. Pengertian diatas laporan keuangan dapat diartikan sebagai suatu informasi yang berkaitan dengan kegiatan operasional bank yang dapat digunakan untuk memprediksi kinerja keuangan suatu bank dan dijadikan pedoman bagi para pihak yang bersangkutan seperti investor, kreditur, dan pemerintah.

Kinerja perusahaan merupakan ukuran keberhasilan atas pelaksanaan fungsi-fungsi keuangan. Untuk menilai kinerja perusahaan, maka dilakukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan perbankan digunakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menilai apakah bank tersebut termasuk dalam perusahaan yang sehat atau tidak. Banyak pihak yang mengatakan bahwa lamanya proses perbaikan masalah krisis yang terjadi di Indonesia disebabkan karena sangat lemahnya *Good Corporate Governance* (GCG) yang diterapkan dalam perusahaan di Indonesia. Sejak saat itu, baik pemerintah maupun investor mulai memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktek GCG. Penyebab krisis ekonomi di negara-negara Asia, salah satunya Indonesia yaitu mekanisme pengawasan dewan komisaris (*board of director*) dan komite audit (*audit committee*) di perusahaan tidak berfungsi efektif dalam melindungi kepentingan pemegang saham. Komite audit merupakan komite yang cukup



penting dalam perusahaan, memiliki peran penting bagi kemajuan perusahaan. Dengan adanya komite audit dapat meningkatkan kualitas pengawasan pada perusahaan yang mampu memberikan perlindungan dan keamanan bagi para pemegang saham. Komite audit ini membantu dewan komisaris serta untuk mewujudkan perusahaan yang GCG.

Kelahiran *Good Corporate Governace* (GCG) pada bank syariah berawal dari dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang menekankan perlunya penerapan GCG pada perbankan, yaitu PBI No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum. PBI ini juga berlaku bagi bank syariah yang artinya perbankan syariah juga diwajibkan menerapkan prinsip GCG dalam pengoperasian kegiatannya. Namun sejak tahun 2010, PBI No.8/4/PBI/2006 sudah tidak berlaku lagi bagi bank syariah. Sebagai gantinya, telah dikeluarkan PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penggantian ini disebabkan karena GCG yang akan diterapkan pada perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip syariah.

Peranan GCG sudah jauh diterapkan dalam ajaran islam. Prinsip-prinsip GCG yang diterapkan terdiri dari keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*) tersebut telah terkandung dalam nilai-nilai syariah yang secara intens terdiri dari *adaalatun* (keadilan), *tawazun* (keseimbangan), *mas'uliyah* (akuntabilitas), *akhlaq* (moral), *shiddiq* (kejujuran), *amanah* (pemenuhan kepercayaan), *fathanah* (kecerdasan), *tabligh* (transparansi, keterbukaan), *hurriyah* (independensi dan kebebasan yang bertanggungjawab),

*ihsan* (professional), *wasathan* (kewajaran), *ghirah* (militansi Syari'ah), *idarah* (pengelolaan), *khilafah* (kepemimpinan), *aqidah* (keimanan), *ijabiyah* (berfikir positif), *raqabah* (pengawasan), *qira'ah* dan *ishlah* (organisasi) yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan) dan nilai-nilai syariah tersebut masuk kedalam prinsip-prinsip syariah.

Selain penerapan GCG pada perbankan syariah, investor dan kreditor juga meninjau karakteristik setiap perusahaan karena karakteristik perusahaan dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan untuk mewakili karakteristik perusahaan. Rudangga dan Sudiarta (2016) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan merupakan cerminan total dari aktiva yang dimiliki suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium size*) dan perusahaan kecil (*small firm*). Ukuran perusahaan dapat dihitung dengan jumlah keseluruhan aset dan penjualan yang bisa menggambarkan kondisi perusahaan dimana perusahaan yang memiliki ukuran besar akan memiliki modal berlebih yang didapatkan untuk mendanai penanaman modalnya untuk mendapatkan keuntungan.

Anandamaya (2021) menjelaskan bahwa perusahaan dengan ukuran besar cenderung menarik para investor karena semakin besar ukuran perusahaan maka kegiatan operasional perusahaan akan semakin besar dan perputaran uang dalam perusahaan akan semakin kompleks dan dapat meningkatkan laba perusahaan yang nantinya akan berdampak pada kinerja keuangan perusahaan. Maka dari itu perusahaan akan termotivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan kestabilan

kinerja keuangan perusahaannya. Hal ini dikarenakan perusahaan memiliki kekuatan keuangan yang lebih besar dalam menunjang kinerja perusahaan dibandingkan perusahaan dengan ukuran yang lebih kecil. Aktiva yang dimiliki perusahaan besar cenderung dapat menghasilkan lebih banyak output dibandingkan dengan perusahaan kecil. Jadi dalam penelitian ini ukuran perusahaan menggunakan indikator total aset dan total penjualan.

Salah satu aspek yang terkandung di dalam GCG adalah struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan merupakan salah satu mekanisme yang digunakan dalam sistem GCG untuk melakukan pengukuran kinerja. Sunarwan (2015) menjelaskan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis yang dapat membantu terciptanya hubungan yang kondusif dan dapat dipertanggungjawabkan diantara elemen suatu perusahaan (dewan komisaris, dewan direksi, dan para pemegang saham) dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Kinerja keuangan merupakan tingkat kesuksesan yang dicapai oleh perusahaan sehingga memperoleh hasil keuangan yang baik dan benar (Sanjaya dan Rizky 2018). Penilaian kinerja keuangan dapat dilihat melalui laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan adalah suatu laporan yang berisi tentang informasi keuangan dalam sebuah perusahaan pada periode tertentu dan digunakan sebagai gambaran untuk melihat kinerja keuangan perusahaan tersebut. Dalam laporan keuangan yang menjadi fokus utama dari para pengguna laporan keuangan adalah laba dari perusahaan.

Laba dari perusahaan tercermin dalam laporan keuangan perusahaan yang dapat diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan salah satu alat yang paling tepat yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan cara melihat kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan (Harianto, 2017). Indikator yang digunakan untuk mengukur rasio profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan indikator *Return On Asset, Return On Equity dan Net Profit Margin*.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terdapat pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Diantaranya adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Aliyaturrosyida (2021) yang berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance, Struktur Modal dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor Pertambangan Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2017-2019*” hasil menunjukkan bahwa variabel *Good Corporate Governance* berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. Variabel struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dan variabel ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan.

Selanjutnya hasil penelitian dilakukan oleh Wahyuni dan Sukartha (2019) yang berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Pada Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan*” hasil menunjukkan bahwa variabel *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu di atas maka peneliti tertarik mengambil judul penelitian: **“Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Sektor Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini rumusan masalah membahas tentang menganalisis pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap kinerja keuangan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan?
2. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan.
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Bagi Akademisi

Dapat memberikan kontribusi dan menjadikan tambahan referensi atau sumber dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh

penerapan *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

b. Bagi Perbankan Syariah

Dapat memberikan input, masukan bagi perbankan syariah serta menganalisis lebih lanjut mengenai pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* pada perbankan syariah sudah dilaksanakan dengan baik atau belum dalam kinerja keuangan bank.

c. Bagi Peneliti

Dapat memperdalam pengetahuan peneliti tentang pengaruh penerapan *Good Corporate Governance*, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah dan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kinerja Keuangan**

##### **2.1.1. Pengertian Kinerja**

Kinerja (*performance*) sudah menjadi kata populer yang sangat menarik dalam pembicaraan manajemen publik. Menurut Indrasari (2017) kinerja diartikan sebagai usaha seseorang yang dicapai dari kemampuan dan perbuatan dalam situasi tertentu. Kinerja yang tinggi sebagai Langkah untuk menuju pada proses tercapainya tujuan organisasi.

Tsauri (2014) menjelaskan bahwa kinerja merupakan hasil dari kegiatan kerja sama diantara anggota atau komponen organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Bastian (2010) menjelaskan bahwa kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi, dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi tersebut.

Jadi kinerja dapat disimpulkan sebagai kemampuan dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan standar akurasi, kelengkapan, efektivitas, dan kecepatan yang ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain kinerja bukan sekedar hasil atau prestasi tetapi suatu upaya atau tindakan untuk menghasilkan sesuatu secara efektif dan efisien.



### **2.1.2 Pengertian Kinerja Keuangan**

Menurut Rudianto (2013) kinerja keuangan adalah hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelolah aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu. Kinerja keuangan sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengetahui dan mengevaluasi sampai dimana tingkat keberhasilan perusahaan berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan.

Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan yang dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Untuk menilai kinerja keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi 2017).

Menurut Dewi, dkk (2021) kinerja keuangan adalah prestasi yang dicapai suatu perusahaan dalam periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut. Selanjutnya Fahmi (2014) menjelaskan pengertian kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

Jadi pengertian kinerja keuangan diatas dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa kinerja keuangan adalah gambaran mengenai hasil operasi perusahaan yang terdapat pada laporan keuangan dalam periode tertentu. Kinerja keuangan diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin

dikendalikan dimasa depan serta kinerja keuangan ini bermanfaat untuk memprediksi kepastian perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada.

### **2.1.3 Tujuan dan Jenis Pengukuran Kinerja Keuangan**

Aisyiah, dkk (2013) menjelaskan bahwa kinerja keuangan dapat diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Tujuan pengukuran kinerja keuangan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat likuiditas dalam melihat kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih.
2. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas dalam menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya, apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Untuk mengetahui tingkat profitabilitas dalam menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba selama periode tertentu.
4. Untuk mengetahui tingkat stabilitas untuk kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar cicilan secara teratur kepada pemegang saham tanpa mengalami hambatan.

Hery (2015) menjelaskan bahwa teknik pengukuran kinerja keuangan terdapat 9 macam analisis sebagai berikut:

1. Analisis Perbandingan Laporan Keuangan  
Analisis perbandingan laporan keuangan yaitu teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dari dua periode atau lebih untuk menunjukkan perubahan jumlah maupun dalam persentase.
2. Analisis Tren  
Analisis tren merupakan teknik yang digunakan untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan dan kinerja perusahaan, apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan.
3. Analisis Persentase per Komponen  
Analisis persentase per komponen merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui persentase masing-masing komponen aset terhadap total aset, persentase masing-masing komponen utang dan modal

terhadap total passiva, persentase masing-masing komponen laporan laba rugi terhadap penjualan bersih.

4. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja  
Analisis sumber dan penggunaan modal kerja merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja selama dua periode waktu yang dibandingkan.
5. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas  
Analisis sumber dan penggunaan kas merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui kondisi kas dan perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu.
6. Analisis Rasio Keuangan  
Analisis rasio keuangan yaitu teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan diantara akun-akun yang tercantum dalam neraca maupun laporan laba rugi.
7. Analisis Perubahan Laba Kotor  
Analisis perubahan laba kotor yaitu teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui posisi laba kotor dari satu periode ke periode berikutnya serta sebab-sebab terjadinya perubahan laba kotor tersebut.
8. Analisis Titik Impas  
Analisis titik impas merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian.
9. Analisis Kredit  
Analisis kredit merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menilai layak tidaknya suatu permohonan kredit debitur kepada kreditor seperti bank.

Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti yang telah dijelaskan di atas. Rasio keuangan banyak digunakan untuk menilai kinerja keuangan bertujuan untuk menilai kinerja perusahaan dalam prospek perusahaan di masa yang akan datang.

#### **2.1.4 Jenis-jenis Rasio Keuangan**

Kasmir (2019) menjelaskan bahwa rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan. Kemudian angka

yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode.

Untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan dapat dilakukan dengan beberapa rasio keuangan. Setiap rasio keuangan memiliki tujuan, kegunaan dan arti tertentu. Kemudian setiap hasil dari rasio yang diukur diinterpretasikan sehingga menjadi berarti bagi pengambilan keputusan. Jenis-jenis rasio keuangan sebagai berikut:

#### 1. Rasio Likuiditas

Menurut Hantono (2018) rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi seluruh kewajiban atau hutang-hutang jangka pendeknya. Ada beberapa jenis rasio likuiditas yang digunakan oleh perusahaan yaitu:

##### a. *Current Ratio*

Menurut Shiddiq dan Khairunnisa (2019) rasio lancar (*current ratio*) adalah ukuran yang umum digunakan atas solvensi jangka pendek kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan utang ketika jatuh tempo. Adapun rumus pengukuran sebagai berikut:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}} \times 100 \%$$

##### b. *Quick Ratio*

Menurut Halim (2014) *Quick ratio merupakan* persediaan tidak dikategorikan sebagai asset lancar karena apabila persediaan habis terjual,

hal ini memang dapat menambah kas, namun proses perolehan kas nya membutuhkan waktu yang cukup lama. Alat untuk mengukur *quick ratio* sebagai berikut:

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$$

c. *Cash Ratio*

Menurut Syafrida Hani (2014) *cash ratio* adalah alat ukur bagi kemampuan perusahaan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan jumlah kas yang dimiliki. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu ukuran dari rasio likuiditas adalah *cash ratio* yang merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang sudah memasuki masa jatuh tempo melalui sejumlah kas yang dimiliki perusahaan. Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau yang setara dengan kas seperti rekening giro atau tabungan di bank. Rumus untuk mencari rasio kas menurut Kasmir (2018) adalah sebagai berikut:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$$

d. *Inventory Turnover*

Dewinigrat dan Mustanda (2018) menjelaskan bahwa untuk melihat tingkat perputaran atas dana yang diolah pada *inventory* melalui *rasio inventory turnover*. Kinerja yang efisien serta persediaan lancara suatu entitas dapat dikatakan baik apabila rasio yang didapatkan diangka

tertinggi. Begitu juga sebaliknya, jika *inventory turnover* yang diperoleh rendah artinya terdapat persediaan menumpuk dan kinerja tidak berjalan efisien dan produktif, karena hal ini tingkat pengembalian yang didapatkan kecil pada investasi (Dewinigrat & Mustanda, 2018).

Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Inventory Turnover} = \frac{\text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Persediaan}}$$

## 2. Rasio Solvabilitas

Menurut Hantono (2018) solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menghitung leverage perusahaan. Adapun jenis-jenis rasio solvabilitas yang digunakan oleh perusahaan seperti:

### a. *Debt to Asset Ratio*

Menurut Kasmir (2017) rasio utang yang digunakan dalam mengukur rasio total utang terhadap total aset. Rumus pengukuran sebagai berikut:

$$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

### b. *Debt to Equity Ratio*

Menurut Sufriani dan Rimawan (2020) *debt to equity ratio* merupakan salah satu aspek yang dinilai dalam mengukur kinerja perusahaan yakni aspek solvabilitas atau hutang perusahaan. Rasio DER ini mengukur bagaimana besarnya hutang dapat ditutupi oleh modal sendiri. Dengan kata lain, semakin banyak modal yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional sebuah perusahaan, maka akan

semakin kecil kemungkinan untuk meminjam untuk meminimalkan kewajiban perusahaan untuk membayar bunga. Alat pengukuran sebagai berikut:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Ekuitas}}$$

c. *Long Term Debt to Equity Ratio*

LTDtER merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. Rumus untuk pengukuran sebagai berikut:

$$\text{Long Term Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Utang jangka panjang}}{\text{Ekuitas}}$$

d. *Time Interest Earned*

Secara umum semakin tinggi rasio, semakin besar kemungkinan perusahaan dapat membayar bunga pinjaman serta bisa sebagai berukuran untuk memperoleh tambahan pinjaman baru asal kreditor. Demikian pula kebalikannya apabila rasionya rendah, semakin rendah pula kemampuan perusahaan untuk membayar bunga serta biaya lainnya. Buat mengukur rasio ini, dipergunakan perbandingan antara laba sebelum bunga serta pajak dibandingkan dengan biaya bunga yang dikeluarkan. Dengan demikian, kemampuan perusahaan buat membayar



bunga pinjaman tidak dipengaruhi oleh pajak. Alat pengukuran untuk *time interest earned* sebagai berikut:

$$\textit{Time Interest Earned} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Biaya Bunga}}$$

### 3. Rasio Aktivitas

Menurut Hery (2015) rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aset yang dimilikinya, termasuk untuk mengukur tingkat efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Adapun jenis-jenis rasio aktivitas yakni:

#### a. *Accounts Receivable Turn Over*

Darminto (2019) menjelaskan bahwa untuk menganalisis rasio perputaran piutang dapat dipergunakan analisa terhadap modal kerja, dikarenakan memiliki hubungan rentang waktu seberapa lama proses perusahaan mengubah piutang menjadi kas. Perhitungan yang dilakukan yaitu penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutang. Berikut rumusnya:

$$\textit{Accounts Receivable Turn Over} = \frac{\text{Penjualan Kredit}}{\text{Rata-rata Piutang}}$$

#### b. *Inventory Turn Over*

Jumingan (2017) menyatakan bahwa *Inventory Turnover* yaitu rasio antara penjualan dengan rata-rata persediaan yang dinilai berdasar harga jual atau kalau memungkinkan rasio ini dihitung dengan

memperbandingkan antara harga pokok penjualan dengan rata-rata persediaan. Rasio ini menunjukkan berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan ini berputar dalam satu tahun. Makin besar *turn over* berarti makin baik. Alat pengukuran sebagai berikut:

$$\text{Inventory Turn Over} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Rata-rata Persediaan}}$$

c. *Working Capital Turn Over*

Andelline dan Widjaja (2018) menjelaskan bahwa *Working turn over* merupakan pemanfaatan modal kerja dalam aktivitas operasional perusahaan secara optimal. Pengukuran efisiensi modal kerja pengukuran dengan menggunakan rata-rata modal kerja. Rumus pengukuran untuk perputaran modal kerja sebagai berikut:

$$\text{Working Capital Turn Over} = \frac{\text{Pendapatan}}{\text{Rata-rata Modal Kerja}}$$

d. *Fixed Asset Turn Over*

Efendi dan Dalesna (2021) menjelaskan bahwa *Fixed Asset Tun Over* adalah rasio yang mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan berdasarkan aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Rasio ini memperlihatkan efektivitas perusahaan menggunakan aktiva tetapnya. Alat pengukuran untuk perputaran aset tetap sebagai berikut:

$$\text{Fixed Asset Turn Over} = \frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Total Aset Tetap}}$$

e. *Total Assets Turn Over*

Kasmir (2014) menjelaskan bahwa *total assets turnover* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. Menurut Kasmir (2014) rumus untuk menghitung *total assets turnover* sebagai berikut:

$$\text{Total Asset Turnover} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aset}}$$

4. Rasio Profitabilitas

Menurut Kasmir (2019) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Rasio ini memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi. Adapun jenis-jenis rasio profitabilitas sebagai berikut:

a. *Return On Asset (ROA)*

Hanafi dan Halim (2016) menjelaskan bahwa *Return on asset* adalah salah satu jenis rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. Tingkat rasio yang tinggi menunjukkan efisiensi manajemen aset, yang berarti efisiensi manajemen.

Jadi dapat disimpulkan bahwa ROA diperoleh dengan cara membandingkan laba bersih terhadap total aset. Rasio ini

digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan sumber ekonomi yang ada untuk menciptakan laba dari asset yang digunakan. *Return on asset* yang positif menunjukkan bahwa total asset yang digunakan untuk operasi perusahaan mampu menghasilkan laba. Sebaliknya, apabila negatif menunjukkan total asset yang digunakan perusahaan mengalami kerugian. Alat Ukur ROA sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

b. *Return On Equity* (ROE)

Ramadhani (2017) menjelaskan bahwa *Return On Equity* (ROE) merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan tingkat kembalian perusahaan atau efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Nilai ROE diperoleh dari laba bersih dibagi dengan total ekuitas. Pengukuran ROE sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}}$$

c. *Return On Investment*

Hantono (2018) menjelaskan bahwa Rasio pengembalian investasi atau *Return On Investment* (ROI) adalah rasio profitabilitas untuk mengetahui keseluruhan dalam seberapa

besar ROI yang sudah ditanamkan pada korporasi untuk menghasilkan pendapatan investasi. Semakin tinggi ROI maka semakin efisien modal yang ditanamkan oleh pemegang saham. ROI yang positif menunjukkan total biaya investasi dapat dikembalikan dan pendapatan investasi yang diperoleh tidak mampu untuk menutup biaya investasi yang telah di keluarkan. Berikut rumus menghitung ROI sebagai berikut:

$$\text{ROI} = \text{Total Penjualan} - \text{Nilai Investasi}$$

d. *Net Profit Margin* (NPM)

*Net Profit Margin* (NPM) disebut juga dengan rasio pendapatan terhadap penjualan. Margin laba bersih sama dengan laba bersih dibagi dengan penjualan bersih (Fahmi, 2018). Oleh sebab itu maka rasio ini menunjukkan berapa besar presentase pendapatan bersih yang diperoleh disetiap penjualan. Semakin besar rasio ini maka semakin baik dianggap kemampuan perusahaan dalam mencakup laba yang tinggi. Pengukuran NPM sebagai berikut:

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

Pada penelitian ini untuk mengukur rasio profitabilitas digunakan tiga proksi yaitu *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE) , dan *Net Profit Margin* (NPM).

## **2.2 Good Corporate Governance**

### **2.2.1 Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG)**

Pertama kalinya istilah *Corporate Governance* diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* di Inggris pada tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal dengan *Cadbury Report*. Laporan inilah yang menentukan praktik *Good Corporate Governance* diseluruh dunia dengan isu *Corporate Governance* semakin berkembang Ketika beberapa peristiwa ekonomi penting terjadi.

Tunggal (2012) menjelaskan bahwa GCG merupakan sebuah sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi suatu proses pengendalian usaha untuk meningkatkan nilai saham. Selain itu juga sebagai bentuk perhatian kepada *stakeholders* dan karyawan serta juga masyarakat di sekitarnya. GCG merupakan suatu perangkat aturan yang mengatur hak dan kewajiban antar *stakeholder* di dalam suatu perusahaan dan mengharuskan suatu perusahaan untuk melakukan transparansi atas semua proses di dalam suatu perusahaan.

Sutedi (2012) menjelaskan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan proses dan struktur yang digunakan oleh organ-organ perusahaan seperti, pemilik modal, komisaris dan direksi untuk meningkatkan keberhasilan suatu usaha dan akuntabilitas perusahaan dan juga tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002, GCG adalah suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan

tetap memerhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika (<https://jdih.bumn.go.id/lihat/KEP-117/MBU/2002>).

Rusliyawati, dkk (2021) menjelaskan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholders*. *Corporate Governance* didefinisikan oleh *Indonesian Institute of Corporate Governance* (IICG) sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dan tetap memerhatikan kepentingan *stakeholders* lain. *Corporate Governance* dimaksudkan untuk mengatur hubungan ini dengan mencegah terjadinya kesalahan signifikansi dalam strategi korporasi dan untuk memastikan kesalahan yang terjadi dapat segera diperbaiki.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa GCG adalah kondisi tata kelola perusahaan yang baik kemudian diterapkan kedalam bentuk pengelolaan pada suatu korporasi atau perusahaan. GCG juga merupakan sistem dalam mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah untuk pemegang saham.

Prinsip GCG adalah prinsip yang sudah saatnya diimplementasikan dalam perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, karena melalui konsep yang menyangkut struktur perseroan, yang terdiri dari unsur-unsur RUPS, direksi dan komisaris dapat terjalin hubungan dan mekanisme kerja, pembagian tugas,

kewenangan dan tanggung jawab yang harmonis, baik secara intern maupun ekstern dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan demi kepentingan *stakeholders* dan *stakeholders*.

Inti dari kebijakan tata kelola perusahaan adalah agar pihak-pihak yang berperan dalam menjalankan perusahaan memahami dan menjalankan fungsi dan peran sesuai wewenang dan tanggung jawab. Pihak yang berperan meliputi pemegang saham, dewan komisaris, komite, direksi, pimpinan unit dan karyawan.

### **2.2.2. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)**

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 88/PMK.06/2015 mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan perseroan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran, untuk pencapaian penyelenggaraan kegiatan usaha yang memperhatikan kepentingan setiap pihak yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan usaha, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang berlaku umum (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/115034/pmk-no-88-pmk062015>)

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) tahun 2019, perusahaan dapat dikatakan baik apabila telah memiliki tata kelola perusahaan atau dikenal dengan GCG yang mengacu pada hal tersebut terdapat lima prinsip yang harus diterapkan terkait GCG sebagai berikut:

1. Keterbukaan (*Transparency*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, korporasi menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah



diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Korporasi mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang di syaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Korporasi dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu korporasi harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan korporat dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Dalam prinsip responsibilitas atau prinsip tanggungjawab ini perusahaan wajib mematuhi peraturan perundang – undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga perusahaan dapat mempertahankan usahanya atau disebut *going concern* serta dapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi (*Independency*)

Untuk melangsungkan pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* perusahaan wajib dikelola secara independen supaya tiap – tiap bagian perusahaan tidak berlomba untuk menjadi pemimpin dan tidak adanya keikutsertaan pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Kegiatan perusahaan harus selalu memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

### 2.2.3 Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance* (GCG)

Mengacu pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Usaha Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, maka dapat diketahui tujuan dari penerapan prinsip-prinsip GCG antara lain:

1. Penerapan prinsip-prinsip GCG untuk memaksimalkan nilai BUMN agar BUMN memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional, sehingga tujuan BUMN dapat dicapai.

2. Agar BUMN dalam menjalankan usahanya dapat dijalankan secara professional, transparan, efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ-organ perusahaan.
3. Agar setiap keputusan yang diambil dilandasi oleh nilai moral dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan kepentingan-kepentingan para stakeholder (melindungi hak stakeholder).
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim investasi nasional (<https://jdih.bumn.go.id/lihat/PER-01/MBU/2011>).

#### **2.2.4 Mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG)**

Mekanisme *Corporate Governance* bagian dari suatu prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap keputusan. Mekanisme didalam penelitian ini terdapat dua yakni mekanisme internal dan mekanisme eksternal.

KNKG (2019) menjelaskan bahwa mekanisme dalam pengawasan *Corporate Governance* dibagi menjadi dua kelompok yaitu internal dan eksternal. Mekanisme internal adalah suatu cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham (RUPS), komposisi dewan direksi, komposisi dewan komisaris, dan pertemuan dengan dewan direksi. Sedangkan mekanisme eksternal adalah suatu cara untuk mempengaruhi perusahaan selain dengan mekanisme internal, seperti pengendalian oleh perusahaan dan pengendalian pasar. Mekanisme *Corporate Governance* dalam penelitian ini meliputi dewan komisaris independen, dewan direksi, kepemilikan institusional, komite audit, kepemilikan manajerial.

##### **2.2.4.1. Dewan Komisaris Independen (DKI)**

Dewan komisaris merupakan salah satu fungsi kontrol yang terdapat dalam suatu perusahaan. Fungsi kontrol yang dilakukan oleh dewan komisaris merupakan salah satu bentuk praktis dari teori agensi. Di dalam suatu perusahaan, Dewan komisaris mewakili mekanisme internal utama untuk melaksanakan fungsi pengawasan dari pemilik dan mengontrol perilaku oportunistik manajemen. Dewan komisaris menjembatani kepentingan pemilik dan manajemen di dalam perusahaan.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 khusus tentang Perseroan Terbatas (PT), dewan komisaris merupakan bagian dari perseroan yang bertugas mengawasi segala tindakan yang dilakukan direksi secara umum dan juga bertugas untuk memberi nasihat kepada direksi dalam menjalankan perusahaan. Dewan komisaris suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari penerapan kebijakan direksi (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39965>).

Dengan adanya dewan komisaris ini diharapkan dapat mengecilkan kemungkinan adanya masalah keagensian yang timbul antara manajemen dan pemegang saham. Dewan komisaris memiliki tugas untuk mengawasi suatu perusahaan agar dapat berjalan dengan baik dan bisa mewakili semua mekanisme internal sehingga secara luas memiliki peran dalam *Corporate Governance*, lebih tepatnya dalam mengawasi manajemen tingkat atas.

Proporsi dewan komisaris dapat memberikan suatu kontribusi yang efektif terhadap hasil dari proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas serta menghindari kemungkinan dari kecurangan pelaporan keuangan. Jadi, komposisi dari dewan komisaris yang mempunyai anggota diluar perusahaan memiliki kecenderungan mempengaruhi kinerja keuangan yang dihasilkan. Menurut Wardati, dkk (2021) semakin tinggi dewan komisaris di dalam perusahaan maka semakin baik karena semakin banyak yang memonitor tingkah laku manajemen sehingga akan selalu bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham.

Komisaris independen dalam memiliki independensi serta menjalankan fungsinya yaitu sebagai fungsi pengawasan dan kepemimpinan yang merupakan hal

dasar yang dibutuhkan dari perannya tersebut. Komposisi dewan komisaris independen yang semakin besar dapat mendorong dewan komisaris untuk bertindak objektif dan mampu melindungi seluruh *stakeholders* perusahaan. Komisaris independen diperlukan untuk meningkatkan independensi dewan komisaris terhadap kepentingan pemegang saham dan benar-benar menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan lainnya.

Menurut Peraturan Pencatatan Nomor I-A tentang Ketentuan umum pencatatan efek bersifat ekuitas di bursa, jumlah komisaris independen minimum 30% dari seluruh dewan komisaris (<https://www.idx.co.id/peraturan/peraturan-pencatatan/>). Menurut Maulana (2020) alat ukur untuk Dewan Komisaris Independen sebagai berikut:

$$\text{DKI} = \frac{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}}$$

#### 2.2.4.2. Dewan Direksi (DD)

Dewan direksi adalah sekelompok individu yang dipilih oleh pemegang saham perusahaan untuk mewakili kepentingan perusahaan dan memastikan bahwa manajemen perusahaan bertindak atas nama mereka. Mereka biasanya bertemu secara berkala untuk menetapkan kebijakan bagi manajemen dan juga untuk pengawasan perusahaan. Setiap perusahaan publik biasanya memiliki dewan direksi, begitupun dengan beberapa organisasi swasta dan nirlaba.

Dewan direksi merupakan aspek yang mempengaruhi mekanisme *corporate governance* yang diperlukan untuk mengurangi *agency problem* antara pemilik dan manajer sehingga timbul keselarasan kepentingan antara pemilik perusahaan dan

manajer. Direktur diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang kemudian dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatatkan dalam daftar wajib perusahaan atas pergantian direktur. Dalam pengangkatan direktur diusulkan oleh anggota RUPS yang memiliki wewenang untuk mengusulkan direktur.

Menurut Jimminder (2019) dalam pengambilan keputusan kegiatan perusahaan akan berjalan dengan cepat apabila jumlah dewan direksi semakin bertambah karena kecepatan pengambilan keputusan dipengaruhi oleh jumlah dewan direksi. Penambahan jumlah anggota dewan direksi ini berdampak positif bagi para *stakeholder* karena pembagian tugas dalam masing – masing anggota akan semakin jelas adanya. Bukan hanya itu saja, bertambahnya jumlah anggota dewan direksi juga akan berdampak pada jaringan pihak luar perusahaan yang akan menjadi lebih baik. Ukuran dewan direksi yang ideal tergantung pada karakteristik masing – masing perusahaan.

Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 dewan pengawas syariah (DPS) adalah, “Dewan yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Ketentuan mengenai jumlah anggota dan kriteria untuk menjadi anggota DPS tunduk pada peraturan Bank Indonesia. Ketentuan mengenai jumlah anggota dan kriteria untuk menjadi anggota DPS tunduk pada peraturan Bank Indonesia (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/137576/peraturan-bi-no-1133pbi2009>).

Dewan direksi membentuk dewan pengawas syariah untuk membantu dalam pengembangan produk finansial perbankan dan investasi tunggal yang tidak

hanya untuk menjamin kebutuhan dari klien yang sangat menuntut dan semakin canggih, tetapi juga kompatibel dengan pelarangan bunga. Semua keanggotaan DPS merangkap jabatan kepada dewan direksi yang telah dijelaskan oleh pertaturan bank.

Direktur bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh direktur yang tidak menjalankan kepengurusan Perseroan yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan anggaran dasar, kebijakan yang tepat dalam menjalankan PT serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Kerugian perseroan akan ditanggung oleh direktur dan akan dimintakan pertanggung jawabannya baik secara perdata atau pidana. Apabila kerugian Perseroan tersebut disebabkan kerugian bisnis dan direktur telah menjalankan kepengurusan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan anggaran dasar, kebijakan yang tepat dalam menjalankan Perseroan serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka direktur tidak dapat disalahkan atas kerugian perseroan. Menurut Riadiani dan Wahyudin (2015) alat untuk mengukur dewan direksi adalah sebagai berikut:

<b>DD = Jumlah Anggota Dewan Direksi</b>
--

#### **2.2.4.3. Kepemilikan Institusional (KI)**

Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat besar dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer.

Kepemilikan institusional merupakan kondisi dimana institusi memiliki saham dalam suatu perusahaan. Institusi tersebut dapat berupa institusi pemerintah, institusi swasta, domestik maupun asing. Investor institusional sering kali menjadi pemilik mayoritas dalam kepemilikan saham, karena para investor institusional memiliki sumber daya yang lebih besar dari pada pemegang saham lainnya sehingga dianggap mampu melaksanakan mekanisme pengawasan yang baik.

Menurut Widyaningsih (2018) kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki perusahaan oleh lembaga keuangan non bank atau institusi, yang mengelola dana atas orang lain. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka semakin kuat tingkat pengendalian yang dilakukan pihak eksternal terhadap perusahaan sehingga *agency cost* yang terjadi di dalam perusahaan semakin. Hal ini memperkecil kemungkinan manajemen untuk melakukan kecurangan sehingga dapat menyelaraskan kepentingan manajemen dan kepentingan *stakeholder* lainnya untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Menurut Scott (2010) dalam Agasva dan Budiantoro (2020) tingkat saham institusional yang tinggi akan menghasilkan upaya-upaya pengawasan yang lebih intensif sehingga dapat membatasi perilaku *opportunistic* manajer, yaitu manajer melaporkan laba secara oportunistik untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya. Jenis perusahaan dengan kepemilikan yang sangat menyebar akan memberikan sebuah imbalan yang lebih besar kepada pihak manajemen. Jenis perusahaan dengan kepemilikan sangat menyebar akan menimbulkan masalah agensi antara *agent* dan *principal*. Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan

pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer.

Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku manajer yang mementingkan kepentingannya sendiri yang pada akhirnya akan merugikan pemilik perusahaan. Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan.

Widyati (2013) kepemilikan saham institusional akan berpengaruh positif jika fungsi kontrol dari pemilik sangat menentukan dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Secara teoritis bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin kuat kontrol terhadap perusahaan, kinerja/nilai perusahaan akan naik apabila pemilik perusahaan bisa mengendalikan perilaku manajemen agar bertindak sesuai dengan tujuan perusahaan. Keberadaan kepemilikan institusional dapat menunjukkan mekanisme *Corporate Governance* yang kuat yang dapat digunakan untuk memonitor manajemen perusahaan. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen perusahaan dapat menjadi sangat penting serta dapat digunakan untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dengan para pemegang saham. Menurut Sitepu (2019) alat ukur untuk kepemilikan institusional sebagai berikut:

$$KI = \frac{\text{Jumlah Saham Institusional}}{\text{Jumlah Saham Yang Beredar}}$$



#### 2.2.4.4 Komite Audit (KA)

Komite audit dibentuk untuk membantu dewan komisaris untuk mengawasi kinerja kegiatan pelaporan keuangan dan pelaksanaan audit baik internal maupun eksternal di dalam perusahaan. Dalam mempertahankan independensi, komite audit beranggotakan komisaris independen, dan pihak-pihak diluar perusahaan yang terlepas dari kegiatan manajemen sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab utama untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan tanggung jawabnya terutama dengan masalah yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal, dan sistem pelaporan keuangan.

Keberadaan komite audit pada saat ini telah menjadi salah satu aspek dalam kriteria penilaian dalam hal pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Selain itu, kehadirannya juga telah mendapat respon positif dari berbagai pihak, antara lain Pemerintah, Bapepam, Bursa Efek, Para Investor, Profesi Hukum, Profesi Akuntan, dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan perkembangan dunia bisnis yang terus diwarnai oleh berbagai skandal yang terkait dengan pengelolaan perusahaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 pasal 70 tentang Badan Usaha Milik Negara mengatakan bahwa komisaris BUMN wajib membentuk komite audit yang bertugas untuk menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh satuan pengawasan internal maupun auditor eksternal (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43919>).

Komite audit merupakan orang yang melakukan pengawasan terhadap perusahaan. Komite audit diharapkan mampu mengontrol dan memonitor keputusan yang dilakukan manajer itu sudah benar yang berarti bahwa keputusan

tidak memihak suatu pihak, tetapi mengikat semua pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan. Komite Audit dituntut dapat bertindak secara independen, independensi komite audit tidak dapat dipisahkan moralitas yang melandasi intergritasnya. Hal ini perlu didasari karena komite audit merupakan pihak yang menjembatani antara eksternal auditor dan perusahaan yang juga sekaligus menjembatani antara fungsi pengawasan dewan komisaris dengan internal auditor.

Dewan komisaris dapat membentuk komite audit yang membantu dewan komisaris melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan, terutama berkaitan dengan *review* sistem pengendalian intern perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit. Komite audit berfungsi sebagai jembatan penghubung antara perusahaan dengan eksternal auditor.

Komite audit dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan jumlah komite audit. Semakin banyak jumlah komite audit yang dimiliki oleh suatu perusahaan akan memberikan perlindungan dan kontrol yang lebih baik terhadap proses akuntansi dan keuangan dan pada akhirnya akan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Menurut Khrisnamurti dan Velayutham (2018) alat pengukuran komite audit dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

<b>KA = Jumlah Anggota Komite Audit Diperusahaan</b>
--

#### 2.2.4.5 Kepemilikan Manajerial (KM)

Menurut Arisandi dan Astika (2019) kepemilikan manajerial dapat mengukur serta menilai kualitas laba mendatang yang dicerminkan dari persistensi laba, semakin banyak saham yang diperoleh oleh manajemen maka menimbulkan lebih besar rasa tanggung jawab manajer untuk mempertanggungjawabkan laporan keuangan melalui kinerjanya. Menurut Candradewi dan Sendana (2016) menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial merupakan pemilik perusahaan sekaligus menjadi pengelola perusahaan. Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial maka semakin kecil peluang terjadinya konflik, karena jika pemilik bertindak sebagai pengelola perusahaan maka dalam pengambilan keputusan akan sangat berhati-hati agar tidak merugikan perusahaan. Menurut Sitepu (2019) menjelaskan pengukuran dari kepemilikan manajerial sebagai berikut:

$$KM = \frac{\text{Saham Yang Dimiliki Manajer dan Dewan Komisaris}}{\text{Seluruh Saham Perusahaan}}$$

### 2.3 Ukuran Perusahaan

Sawitri, dkk (2017) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan. Semakin besar aset yang dimiliki suatu perusahaan, maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan dilihat dari seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan yang dapat digunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan, terdapat berbagai proksi yang biasanya digunakan untuk mewakili ukuran perusahaan yaitu total aset, jumlah penjualan, dan kapitalisasi pasar.

Menurut Sawir (2015) ukuran perusahaan dinyatakan sebagai determinan dari struktur keuangan. Berdasarkan definisi tersebut maka dapat diketahui bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang menentukan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari nilai *equity*, nilai penjualan, jumlah karyawan dan nilai total aktiva yang merupakan variabel konteks yang mengukur tuntutan pelayanan atau produk organisasi.

Ukuran perusahaan merupakan nilai besar kecilnya perusahaan yang ditunjukkan oleh total aset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak sehingga memengaruhi kinerja sosial perusahaan karena perusahaan yang besar mempunyai pandangan yang lebih jauh, sehingga lebih berpartisipasi dalam menumbuhkan kinerja sosial perusahaan dan menyebabkan tercapainya tujuan perusahaan.

Ukuran perusahaan dihitung dengan merubah struktur total aktiva perusahaan dengan menggunakan bentuk logaritma natural. Ukuran perusahaan dikalkulasi dengan penggunaan logaritma natural total aset dan total penjualan. Logaritma natural digunakan untuk meminimalisir data dengan fluktuasi yang berlebihan. Penggunaan logaritma natural juga bertujuan menyederhanakan jumlah aset yang kemungkinan triliunan rupiah tanpa merubah proporsi sebenarnya (wahyuni, dkk 2013).

Ukuran perusahaan diindikasikan dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, karena dengan besarnya ukuran perusahaan akan mempunyai kelebihan sumber dana yang diperoleh untuk membiayai investasinya dalam memperoleh laba.

Menurut Hery (2017) ukuran perusahaan dilihat berdasarkan indikator total aset, total penjualan, nilai pasar saham dan jumlah tenaga kerja. Pengukuran indikator ukuran perusahaan sebagai berikut:

a. Total Aset

Menurut Sari, dkk (2021) perusahaan dengan ukuran perusahaan yang besar akan disukai oleh investor karena memiliki aset dalam jumlah besar yang berdampak pada peningkatan laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Menurut Ruroh dan Latifah (2018) menjelaskan bahwa pengukuran untuk variabel manifes total aset sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln Total Aset}$$

Keterangan:

Ln = Logaritma natural

b. Total Penjualan

Menurut Kasmir (2012) menjelaskan bahwa penjualan adalah omzet barang atau jasa yang dijual, baik dalam unit ataupun rupiah. Penjualan juga mempunyai fungsi pemasaran yang sangat penting bagi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu mendapatkan laba untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Menurut Putri dan Ramadhan (2021) menjelaskan bahwa alat ukur variabel manifes total penjualan untuk ukuran perusahaan sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln Total Penjualan}$$

Keterangan:

Ln = Logaritma natural

Dalam penelitian ini untuk mengukur variabel ukuran perusahaan digunakan dua variabel manifes yaitu variabel manifes total aset dan variabel manifes total penjualan.

## 2.4 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Maharani	2018	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan <i>Property Dan Real Estate</i> Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017	Variabel Idenpenden 1. Dewan Direksi 2. Ukuran dewan komisaris 3. Komite Audit 4. Ukuran perusahaan Variabel Dependen ROA	Hasil penelitian ini menjelaskan dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, dewan komisaris, komite audit dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

2.	Sitepu	2019	Pengaruh Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia	<p>Variabel independen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dewan Komisaris Independen</li> <li>2. Dewan Direksi</li> <li>3. Dewan Pengawas Syariah</li> <li>4. Komite Audit</li> <li>5. Kepemilikan Manajerial</li> <li>6. Kepemilikan Institusional</li> <li>7. Ukuran Perusahaan</li> </ol> <p>Variabel Dependen</p> <p>ROE</p>	Hasil penelitian ini dewan komisaris independen, dewan direksi dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Variabel dewan pengawas syariah, kepemilikan manajerial dan komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.
3.	Wahyuni dan Sukartha	2019	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan	<p>Variabel Idenpenden</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. GCG</li> <li>2. Ukuran Perusahaan</li> </ol> <p>Variabel Dependen</p> <p>ROA</p>	Hasil penelitian membuktikan GCG berpengaruh positif pada kinerja keuangan perusahaan perbankan. Ukuran perusahaan berpengaruh positif pada kinerja keuangan perusahaan perbankan.

4.	Ardhana	2019	Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dalam mengukur risiko dan kinerja keuangan bank syariah di Indonesia	Variabel Idenpenden 1. GCG Variabel Dependen ROA	Hasil penelitian ini variabel independen kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris independen dan ukuran dewan pengawas syariah serta <i>Non Performing Financing</i> (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Return On Assets</i> (ROA)
5	Oktavia , Jefri dan Kusuma	2020	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan properti dan <i>Real Estate</i> yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2018)	Variabel Idenpenden 1. Komisaris Independen 2. Komite Audit 3. Ukuran Perusahaan  Variabel dependen <i>Tax Avoidance</i>	Hasil dari penelitian bahwa variabel komisaris independen, komite audit, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> serta komisaris independen, komite audit serta ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan.



6	Sari, Sukadana, Widnyana	2021	Pengaruh <i>corporate governance</i> , ukuran perusahaan dan <i>Leverage</i> terhadap nilai perusahaan pada perusahaan Manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar Di bursa efek Indonesia	<p>Variabel Indenpenden</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Corporate governance</i></li> <li>2. Ukuran Perusahaan</li> <li>3. <i>Leverage</i></li> </ol> <p>Variabel dependen</p> <p>Nilai Perusahaan</p>	<p>Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa <i>Corporate governance</i>, ukuran perusahaan, dan <i>Leverage</i> berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018</p>
7	Anandamaya	2021	Pengaruh <i>good corporate governance</i> , ukuran perusahaan Dan leverage terhadap kinerja keuangan	<p>Variabel Indenpenden</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dewan Komisaris</li> <li>2. Komisaris Independen</li> <li>3. Komite Audit</li> </ol> <p>Variabel Dependen</p> <p>ROA</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris, komisaris independen, komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan serta variabel leverage berpengaruh negatif terhadap kinerja</p>

					keuangan.
8	Fitriyani	2021	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar di BEI	<p>Variabel Idenpenden</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. proporsi Dewan Komite Independen</li> <li>2. Kepemilikan Institusional</li> <li>3. Ukuran Perusahaan</li> </ol> <p>Variabel Dependen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kinerja Keuangan (ROA)</li> </ol>	Hasil penelitian memperlihatkan bahwa proporsi Dewan Komite Independen (DKI), Kepemilikan Institusional (KI), Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap ROA perusahaan subsektor perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019.
9.	Pratama dan Siahaan	2021	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	<p>Variabel Idenpenden</p> <p><i>Corporate Governance Perception Index (CGPI)</i></p> <p>Variabel Dependen</p> <p><i>Return on Equity (ROE)</i></p>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Corporate Governance Perception</i> Indeks berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksikan ROE pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. Ukuran

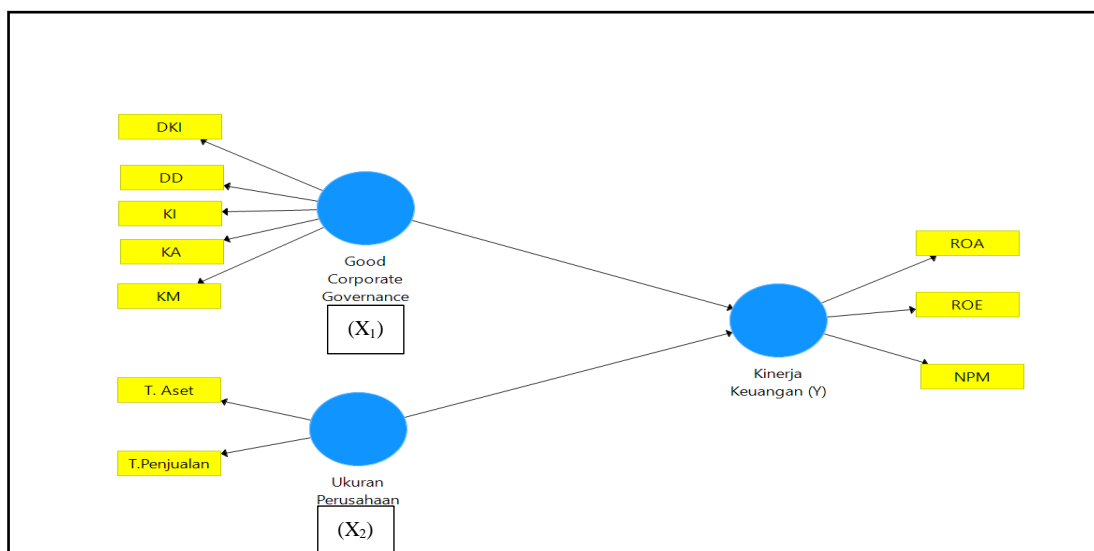
			Tahun 2015-2019		perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksikan ROE pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019
10.	Heriyani, Hernawati, Ermaya	2021	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan	Variabel Idenpdn <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dewan komisaris</li> <li>2. komite audit</li> <li>3. komisaris independen</li> <li>4. kepemilikan institusional</li> <li>5. ukuran perusahaan</li> </ol> Variabel Dependen  Kinerja Perusahaan	Hasil penelitian ini adalah dewan komisaris, komite audit, komisaris independen, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Tetapi uji secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.
11	Tisna dan Agustami	2016	Pengaruh <i>Good Corporate Governanc e</i> Dan Ukuran Perusahaan Terhadap	Variabel dependen  GCG, ukuran perusahaan  Variabel Independen	Hasil penelitian ini <i>menjelaskan Good corporate governance</i> dan Ukuran Perusahaan secara simultan atau bersama-sama

			Kinerja Keuangan Perusahaan (Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2010-2014)	1. Kinerja keuangan	berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.
12	Bukhori	2012	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI (2010)	Variabel dependen GCG dengan indikator Ukuran Dewan direksi, Ukuran Dewan Komisaris  Variabel Independen Kinerja Keuangan dengan ROA	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi dan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
13	Aliyaturrosyida	2021	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , Struktur Modal dan Ukuran	Variabel Independen 1. GCG 2. Struktur Modal 3. Ukuran Perusahaan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa GCG dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan

			Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor Pertambangan Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2017-2019	Variabel dependen  Kinerja Keuangan	terhadap kinerja keuangan dan struktur modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan
--	--	--	---	---	--

## 2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang baik akan menjelaskan secara teoritis hubungan antar variabel yang akan diteliti. Penelitian ini melihat adanya hubungan yang terjadi antara *Good Corporate Governance* dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan sehingga kerangka konseptual tersebut dapat digambarkan seperti berikut:



Sumber: Hasil Output Olahan Peneliti

**Gambar 2.5**  
**Kerangka Konseptual**

## 2.5 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan kerangka konseptual maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: GCG berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

H<sub>2</sub>: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tempat dan Waktu Penelitian**

Objek penelitian ini adalah perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan dari bulan Maret 2022 sampai Februari 2023.

#### **3.2 Populasi dan Sampel**

##### **3.2.1 Populasi**

Menurut Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) dan perusahaan perbankan konvensional yang mempunyai Unit Usaha Syariah (UUS) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021 yaitu 47 perusahaan.

##### **3.2.2 Sampel**

Menurut Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi, dimana sampel yang baik adalah sampel yang dapat mewakili sebanyak mungkin karakteristik dari seluruh populasi. Sampel penelitian diambil dengan teknik *purposive judgment sampling* yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Kriteria Pemilihan Sampel**

No	Kriteria Pemilihan Sampel	Jumlah
1	Perusahaan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.	4
2	Perusahaan perbankan konvensional yang mempunyai unit usaha syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2021.	13
3	Perusahaan perbankan tersebut mempublikasikan laporan keuangannya secara berturut-turut dari tahun 2017-2021.	17

Dari kriteria pemilihan sampel diatas, maka diperoleh jumlah sampel yang akan digunakan 17 perusahaan dari 47 perusahaan Bank Umum Syariah dan Perbankan Konvensional yang mempunyai Unit Usaha Syariah (UUS) serta terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.

### **3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional adalah variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan cara pengukuran dari masing-masing variabel tersebut. Pada penelitian ini definisi operasional variabel dibagi menjadi dua yaitu variabel dependen dan variabel independen.



### 3.3.1 Variabel Dependen

#### 1. Kinerja Keuangan (Y)

Kinerja keuangan merefleksikan kinerja fundamental perusahaan. Kinerja keuangan diukur dengan data fundamental perusahaan, yaitu data yang berasal dari laporan keuangan, kinerja keuangan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan variabel manifes *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* dan *Net Profit Margin* (NPM) dengan rumus sebagai berikut:

##### a. ROA

Hanafi dan Halim (2016) menjelaskan bahwa *Return on asset* adalah salah satu jenis rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu.

Alat ukur untuk ROA sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

##### b. ROE

Menurut Pratama dan Siahaan (2021) *Return On Equity* (ROE) merupakan kemampuan perusahaan dalam menggunakan modalnya untuk memperoleh laba. ROE menggunakan aset yang diberikan pemegang saham. ROE digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menggunakan aset yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Alat ukur untuk ROE sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}}$$

c. NPM

Menurut Fahmi (2018) *Net Profit Margin* (NPM) disebut juga dengan rasio pendapatan terhadap penjualan. Margin laba bersih sama dengan laba bersih dibagi dengan penjualan bersih. Alat ukur untuk NPM sebagai berikut:

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Penjualan}}$$

### 3.3.2 Variabel Independen

#### 3.3.2.1 Variabel *Good Corporate Governance* (GCG) (X<sub>1</sub>)

Untuk mengukur GCG terdapat indikator dalam pengukurannya sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris Independen (DKI)

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata sesuai kepentingan perusahaan. Dewan komisaris independen adalah jumlah komisaris independen dibagi total jumlah anggota dewan komisaris. Secara sistematis dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{DKI} = \frac{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}}$$

## 2. Dewan Direksi (DD)

Dewan direksi adalah sekelompok individu yang dipilih oleh pemegang saham perusahaan untuk mewakili kepentingan perusahaan dan memastikan bahwa manajemen perusahaan bertindak atas nama mereka. Mereka biasanya bertemu secara berkala untuk menetapkan kebijakan bagi manajemen dan juga untuk pengawasan perusahaan. Setiap perusahaan publik biasanya memiliki dewan direksi, begitupun dengan beberapa organisasi swasta dan nirlaba. Dewan Direksi dapat diukur dengan menggunakan:

## 3. Kepemilikan institusional (KI)

Kepemilikan institusional adalah besarnya jumlah saham yang dimiliki institusi dari total saham yang beredar. Adanya kepemilikan institusi dapat memantau secara profesional perkembangan investasinya sehingga tingkat pengendalian terhadap manajemen sangat tinggi yang pada akhirnya dapat menekan potensi kecurangan. Kepemilikan institusional diukur dengan persentase kepemilikan saham oleh perbankan, perusahaan asuransi, dana pensiun, reksadana, dan institusi lain dibagi total jumlah saham yang beredar. Secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{KI} = \frac{\text{Jumlah Saham Institusional}}{\text{Jumlah Saham Yang Beredar}}$$

#### 4. Komite Audit (KA)

Berdasarkan Surat Edaran dari Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. SE-008/BEJ/11-2001 tanggal 7 Desember 2001 serta Pedoman Pembentukan Komite Audit menurut BAPEPAM perihal keanggotaan komite audit, disebutkan bahwa jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, termasuk ketua komite audit. Alat ukur untuk komite audit sebagai berikut:

$$\text{KA} = \text{Jumlah Komite Audit Diperusahaan}$$

#### 5. Kepemilikan Manajerial (KM)

Diyah dan Erman dalam Sintyawati dan Dewi (2018) menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial adalah proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kepemilikan manajerial yang besar di dalam perusahaan akan efektif untuk mengawasi aktivitas perusahaan. Pengukuran kepemilikan manajerial sebagai berikut:

$$\text{KM} = \frac{\text{Saham Yang Dimiliki Manajer dan Dewan Komisaris}}{\text{Seluruh Saham Perusahaan}}$$

#### 3.3.2.2 Variabel Ukuran Perusahaan ( $X_2$ )

Menurut Wahyuni dan Sukartha (2019) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu cara yang dapat mengklasifikasikan perusahaan dengan berbagai cara yaitu total aset, total penjualan dan jumlah tenaga kerja. Semakin besar total aset maupun penjualan, maka akan semakin besar pula ukuran perusahaan. ukuran perusahaan dapat di ukur dengan berbagai macam cara seperti total aset, jumlah penjualan, dan jumlah tenaga kerja. Dalam penelitian ini ukuran

perusahaan di ukur dengan logaritmatotal aset dan logaritma total penjualan yang dimiliki perusahaan. Rumus yang digunakan untuk mengukur ukuran perusahaan yaitu :

a. Total Aset

Menurut Sari, dkk (2021) Total aset merupakan perusahaan dengan ukuran perusahaan yang besar akan disukai oleh investor karena memiliki aset dalam jumlah besar yang berdampak pada peningkatan laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Alat ukur untuk total aset sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln Total Aset}$$

b. Total Penjualan

Kasmir (2012) menjelaskan bahwa penjualan adalah omzet barang atau jasa yang dijual, baik dalam unit ataupun rupiah. Alat ukur untuk total penjualan sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln Total Penjualan}$$

Keterangan :

Ln= Logaritma Natural

**Tabel 3.2**  
**Difinisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

<b>Variabel</b>	<b>Difinisi Operasional</b>	<b>Pengukuran</b>	<b>Skala</b>
Kinerja keuangan (Y)	<p>1. <i>Return On Asset</i> (ROA) adalah salah satu jenis rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu.</p> <p>2. <i>Return On Equity</i> (ROE) merupakan kemampuan perusahaan dalam menggunakan modalnya untuk memperoleh laba</p> <p>3. <i>Net Profit Margin</i> (NPM) disebut juga dengan rasio pendapatan terhadap penjualan.</p>	$\frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$  $\frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}}$  $\frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Penjualan}}$	Rasio
<i>Good Corporate Governance</i> (X <sub>1</sub> )	<p>1. Dewan Komisaris Independen (DKI) merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau</p>	$\frac{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}}$	Rasio

	<p>bertindak sematamata sesuai kepentingan perusahaan.</p> <p>2. Dewan Direksi (DD) merupakan sekelompok individu yang dipilih oleh pemegang saham perusahaan untuk mewakili kepentingan perusahaan dan memastikan bahwa manajemen perusahaan bertindak atas nama mereka.</p> <p>3. Kepemilikan institusional adalah besarnya jumlah saham yang dimiliki institusi dari total saham yang beredar.</p> <p>4. Komite Audit Pedoman Pembentukan Komite Audit menurut BAPEPAM perihal keanggotaan komite audit, disebutkan bahwa jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, termasuk ketua komite audit.</p> <p>5. Kepemilikan Manajerial adalah adalah proporsi pemegang saham</p>	<p>Jumlah anggota Dewan Direksi</p> <p><math display="block">\frac{\text{Jumlah Saham Institusional}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}</math></p> <p>Jumlah Komite Audit Diperusahaan</p>	<p>Nominal</p> <p>Rasio</p> <p>Nominal</p>
--	---	---	--

	dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan	$\frac{\text{Saham yang dimiliki Manajer dan Dewan Komisaris}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$	Rasio
Ukuran Perusahaan (X <sub>2</sub> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Total Aset perusahaan dengan ukuran perusahaan yang besar akan disukai oleh investor karena memiliki aset dalam jumlah besar yang berdampak pada peningkatan laba yang dihasilkan oleh perusahaan.</li> <li>2. Total Penjualan penjualan adalah omzet barang atau jasa yang dijual, baik dalam unit ataupun rupiah.</li> </ol>	Ln Total Aset	Rasio
		Ln Total Penjualan	Rasio



### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode atau cara yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan bagi suatu penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu pengumpulan data (data sekunder) yang diperoleh di situs Bursa Efek Indonesia yakni [www.idx.ac.id](http://www.idx.ac.id) dimana objek penelitian berupa data perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2017-2021.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah *Structural Equation Model* (SEM) dan menggunakan bantuan perangkat lunak yaitu *Partial Least Square* (PLS) atau SmartPLS. Menurut Santoso (2014) menjelaskan bahwa *Structural Equation Model* (SEM) adalah teknik statistik multivariat yang merupakan kombinasi antara analisis faktor dan analisis regresi (korelasi) yang bertujuan untuk menguji hubungan-hubungan antar variabel yang ada pada sebuah model baik itu antar indikator dengan konstruksinya ataupun hubungan antar konstruk.

Menurut Hair, dkk (2014) menjelaskan Analisis data menggunakan SEM terbagi atas dua yaitu

1. *Covarian Based* (CB-SEM) dan *Partial Least Square* (PLS-SEM). Analisis CB-SEM selalu mempersyaratkan berbagai asumsi seperti teori harus cukup mendukung, ukuran sampel yang besar dan data harus terdistribusi normal serta software yang menggunakan CB-SEM ini adalah AMOS, Lisrell, EQS, M-Plus.
2. Dalam analisis PLS-SEM dapat digunakan untuk sampel yang berjumlah kecil walaupun demikian jumlah sampel yang besar akan lebih mampu meningkatkan presisi estimasi. PLS tidak membutuhkan persyaratan asumsi

distribusi data harus normal atau tidak. Bentuk kongsruk dapat menggunakan model reflektif.

Berdasarkan tujuannya, analisis faktor dibedakan menjadi dua yaitu *exploratory/penyelidikan* atau *confirmatory/ penegasan* (Hair, dkk 2010) yaitu :

1. *Exploratory Factor Analysis* (EFA), pendekatan yang bertujuan untuk menyelidiki faktor-faktor yang terkandung dalam variabel-variabel pengamatan tanpa penentuan teori pengukuran yang mengaturnya. Metode statistika yang termasuk dalam kategori EFA adalah Analisis Cluster dan Analisis Faktor.
2. *Confirmatory Factor Analysis* (CFA), pendekatan yang sudah memiliki teori pengukuran yang mengatur hubungan antara variabel-variabel pengamatan dan faktor-faktor yang diberikan dalam suatu penelitian dengan tujuan untuk melakukan penegasan suatu teori pengukuran yang diberikan dalam rangka membandingkan teoritis dengan hasil empiris/pengamatan. Metode statistika yang termasuk dalam kategori CFA adalah Structural Equation Model (SEM) (Hair, dkk., 2010).

Rodliyah (2016) menyebutkan bahwa komponen-komponen dalam SEM adalah sebagai berikut:

1. Jenis variabel dalam SEM ada dua, yaitu:
  - a. Variabel laten (*unobserved variabel atau latent variable*) yaitu variabel yang tidak dapat diamati secara langsung, tetapi dapat direpresentasikan oleh satu atau lebih variabel manifes/indikator. Menurut Kuntoro (2006), variabel laten ada dua macam yaitu variabel laten endogen atau variabel terikat dan variabel laten eksogen atau variabel bebas, digambarkan dalam bentuk lingkaran/elips, dinotasikan dengan  $\xi$  (*small ksi*) untuk variabel laten eksogen dan  $\eta$  (*small eta*) untuk variabel laten endogen.
  - b. Variabel teramati (*observed variable atau measurement variabel*) yang sering juga disebut dengan indikator/variabel manifes (manifest variabel) yaitu variabel yang dapat diamati secara empiris melalui kegiatan survei atau sensus (Hair dkk, 1995).
2. Jenis model dalam SEM ada dua, yaitu:
  - a. Model struktural (*structural model/inner model*) yaitu model yang menggambarkan hubungan-hubungan diantara variabel laten yang membentuk persamaan simultan.
  - b. Model pengukuran (*measurement model/outer model*) yaitu model yang menjelaskan hubungan sebuah variabel laten dengan variabel manifes dalam bentuk analisis faktor.

Model umum persamaan struktural dan pengukuran dalam SEM secara matematis dituliskan sebagai berikut (Timm, 2002):

- a. Model Struktural (*inner model*) Model Struktural atau inner model adalah model yang menggambarkan hubungan antar variabel laten eksogen dan atau variabel laten endogen
- b. Model Pengukuran (*outer model*) Model Pengukuran atau outer model adalah model yang menggambarkan hubungan antara variabel laten dengan variabel manifes atau indikatornya. *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) merupakan metode yang digunakan untuk menguji model pengukuran yang menggambarkan hubungan antara variabel laten dengan indikator-indikatornya

Terdapat beberapa istilah dan notasi yang sering digunakan pada SEM, berikut ini merupakan penjelasan singkat mengenai istilah-istilah dalam SEM (Ghozali, 2011):

- i. Variabel laten atau *construct* atau *unobserved variables* merupakan variabel yang tidak dapat diukur melalui observasi secara langsung namun memerlukan beberapa indikator untuk dapat mengukurnya.
- ii. Variabel indikator atau *manifest variables* atau *observed variable* adalah variabel yang dapat diukur dan diamati secara langsung, variabel indikator/manifes digunakan untuk mengukur sebuah variabel laten.
- iii. Variabel eksogen adalah variabel yang tidak dipengaruhi variabel lain, ditunjukkan dengan tidak ada tanda panah yang mengarah pada variabel tersebut. Variabel eksogen dinotasikan dengan simbol  $\xi$  (ksi) yang merupakan penduga atau penyebab untuk variabel lainnya dalam suatu model persamaan struktural. Jika terdapat dua variabel eksogen yang saling berkorelasi, ditunjukkan dengan gambar tanda panah dua arah (*nonrecursive*) yang menghubungkan kedua variabel tersebut.
- iv. Variabel endogen, dinotasikan dengan simbol  $\eta$  (eta) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya (*independent variable*) dalam suatu model penelitian. Variabel endogen ditunjukkan dengan adanya tanda panah yang mengarah pada variabel tersebut.
- v. Variabel antara yang ditunjukkan dengan adanya tanda panah yang mengarah dan meninggalkan suatu variabel, sedangkan variabel terikat hanya memiliki tanda panah yang mengarah ke variabel tersebut.
- vi. Model struktural atau disebut juga dengan inner model adalah model yang menggambarkan hubungan-hubungan antara variabel laten. Sebuah hubungan diantara variabel laten serupa dengan sebuah persamaan regresi linier diantara variabel laten tersebut.

- vii. Model pengukuran (*measurement model*) atau outer model adalah model yang menghubungkan variabel indikator dengan variabel laten.
- viii. *Loading factor* dinotasikan dengan simbol  $\lambda$  (lambda) adalah nilai yang menyatakan hubungan-hubungan antara variabel laten dengan indikatornya. Faktor loading memiliki nilai diantara -1 sampai dengan 1 seperti korelasi.
  - i. Indikator reflektif adalah indikator yang menjelaskan bahwa variabel laten merupakan pencerminan dari indikator-indikatornya. Pada indikator reflektif, kesalahan pengukuran (error) adalah pada tingkat indikator dan disimbolkan dengan  $\varepsilon$  (epsilon) atau  $\delta$  (delta).
  - ix. Indikator formatif adalah indikator yang menjelaskan bahwa variabel laten dibentuk atau disusun oleh indikatornya. Sehingga seolah-olah variabel laten dipengaruhi oleh indikator-indikatornya. Pada indikator formatif kesalahan pengukuran berada pada tingkat variabel laten dan dinotasikan oleh  $\zeta$  (zeta).
  - x. Analisis jalur (path analysis) merupakan suatu teknik statistika yang bertujuan untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada model regresi berganda jika variabel prediktornya mempengaruhi variabel respon tidak secara langsung tetapi juga secara tidak langsung. Analisis jalur digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah mendukung teori, yang sebelumnya, telah dihipotesiskan oleh peneliti mencakup kaitan struktural hubungan kausal antar variabel terukur. Subyek utama dalam analisis jalur adalah variabel-variabel yang saling berkorelasi. Dengan analisis jalur, semua pengaruh baik langsung (*direct effect*) maupun tak langsung (*indirect effect*), dan pengaruh total (*total cause effect*) pada suatu faktor dapat diketahui. Dalam perkembangannya, analisis jalur ini dilakukan dalam kerangka pemodelan SEM.

Dalam menguji data dalam SmartPls versi 3 digunakan dua tahap analisis pengujian yaitu pengujian *outer model* dan pengujian *inner model* (Ananda, 2017).

### 3.5.1 Pengujian Outer Model

Menurut Pering (2021) menjelaskan bahwa pengujian *outer model* melihat hubungan antar variabel laten dengan indikator-indikatornya, atau dapat dikatakan bahwa outer model menjelaskan bagaimana setiap indikator

berhubungan dengan variabel latennya. Uji yang dilakukan pada saat *outer model* sebagai berikut:

#### **3.5.1.1 Uji Validitas Konvergen**

Menurut Sholihin dan Ratmono (2013) menjelaskan bahwa Validitas Konvergen merupakan bagian dari *measurement model* (model pengukuran) yang digunakan dalam PLS-SEM disebut sebagai *outer model*. Kriteria untuk menilai apakah *outer model* memenuhi syarat validitas konvergen untuk konstruk reflektif *loading* harus di atas 0.7. Nilai *loading factor* 0.7 sering tidak terpenuhi maka nilai *loading factor* 0.5 masih bisa dikatakan valid (Hair, dkk 2014)

#### **3.5.1.2 Uji Validitas Diskriminan**

Menurut Ghazali dan Latan (2015) menjelaskan bahwa Validitas diskriminan bertujuan untuk menentukan apakah suatu indikator reflektif benar merupakan pengukur yang baik bagi konstruksya. Validitas diskriminan dilakukan untuk melihat nilai *cross loading factor* dan mengetahui bahwa konstruk memiliki nilai diskriminan yang memadai yaitu dengan cara membandingkan korelasi indikator suatu konstruk dengan konstruk lainnya.

#### **3.5.1.3 Uji Average Variance Extracted (AVE)**

Menurut Sholihin dan Ratmono (2013) menjelaskan bahwa Nilai AVE yang disarankan adalah di atas 0.5. Seluruh nilai AVE di atas 0.5 yang berarti telah memenuhi syarat validitas berdasarkan AVE.

Nilai AVE menggambarkan besarnya varian atau keragaman variabel manifes yang dapat dimiliki oleh konstruk laten. Dengan

demikian, semakin besar varian atau keragaman variabel manifes yang dapat dikandung oleh konstruk laten, maka semakin besar representasi variabel manifes terhadap konstruk latennya. Dalam penggunaan nilai AVE untuk suatu kriteria dalam menilai *convergent validity* nilai AVE minimal 0.5 menunjukkan ukuran *convergent validity* yang baik, artinya variabel laten dapat menjelaskan rata-rata lebih dari setengah varian dari indikator-indikatornya. Nilai AVE diperoleh dari penjumlahan kuadrat *loading factor* dibagi dengan error (Ghozali, 2014)

#### 3.5.1.4 Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali dan Latan (2015) menjelaskan bahwa mengukur reabilitas suatu konstruk menggunakan indikator reflektif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu *composite reability* dan *Cronbach alpha* sebagai berikut:

##### c. *Composite Reliability*

Menurut Ghazali dan Latan (2014) menjelaskan bahwa *Composite Reliability* berfungsi untuk mengukur reliabilitas. *Composite reliability* ini juga digunakan untuk melihat kestabilan dan konsistensi *internal indicator* tetapi pada data yang mempunyai *composite reliability* mempunyai nilai reliabilitas yang lebih tinggi.

##### d. *Cronbach's Alpha*

*Cronbach's Alpha* merupakan uji reliabilitas yang dilakukan memperkuat hasil dari *composite reliability*. Suatu variabel dapat dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai *cronbach's alpha*  $> 0.6$ .

#### 3.5.2 Pengujian *Inner Model*

Menurut Ghozali dan Latan (2015) menjelaskan bahwa *Inner model* ini bertujuan memformulasikan hubungan antar variabel dengan

berdasarkan hipotesis penelitian. Pengujian dalam model *structural* yaitu *R-Square* berfungsi untuk melihat kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan varian dan variabel terikatnya. Kriteria untuk nilai *R-Square* sebesar 0.19 tergolong lemah, nilai 0.33 tergolong moderat dan nilai 0.67 tergolong kuat (Chin dalam Ghozali dan Latan, 2015). Untuk pengujian hipotesis dilakukan dengan cara melihat profitabilitas *T*-statistiknya. Dalam pengujian hipotesis diterima apabila nilai *p value*  $< 0.05$  dan *t* tabel  $> 1.96$ .

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil

##### 4.1.1. Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari laporan keuangan tahunan perusahaan perbankan tahun 2017-2021 meliputi *Good Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan dan Kinerja Keuangan. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari Bursa Efek Indonesia. Hasil Pengolahan data berupa informasi dalam menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan. Berikut ini proses penyeleksian dalam penelitian sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Kriteria sampel penelitian**

No	Kriteria Pemilihan Sampel	Jumlah
1.	Perusahaan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.	4
2.	Perusahaan perbankan konvensional yang mempunyai unit usaha syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2021.	13
3.	Perusahaan perbankan tersebut mempublikasikan laporan keuangannya secara berturut-turut dari tahun 2017-2021	17

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) (data diolah)



Berdasarkan tabel kriteria diatas maka diperoleh sampel sebanyak 17 perusahaan perbankan syariah dan perbankan konvensional yang mempunyai Unit Usaha Syariah (UUS) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021 dengan daftar perusahaan sebagai berikut:

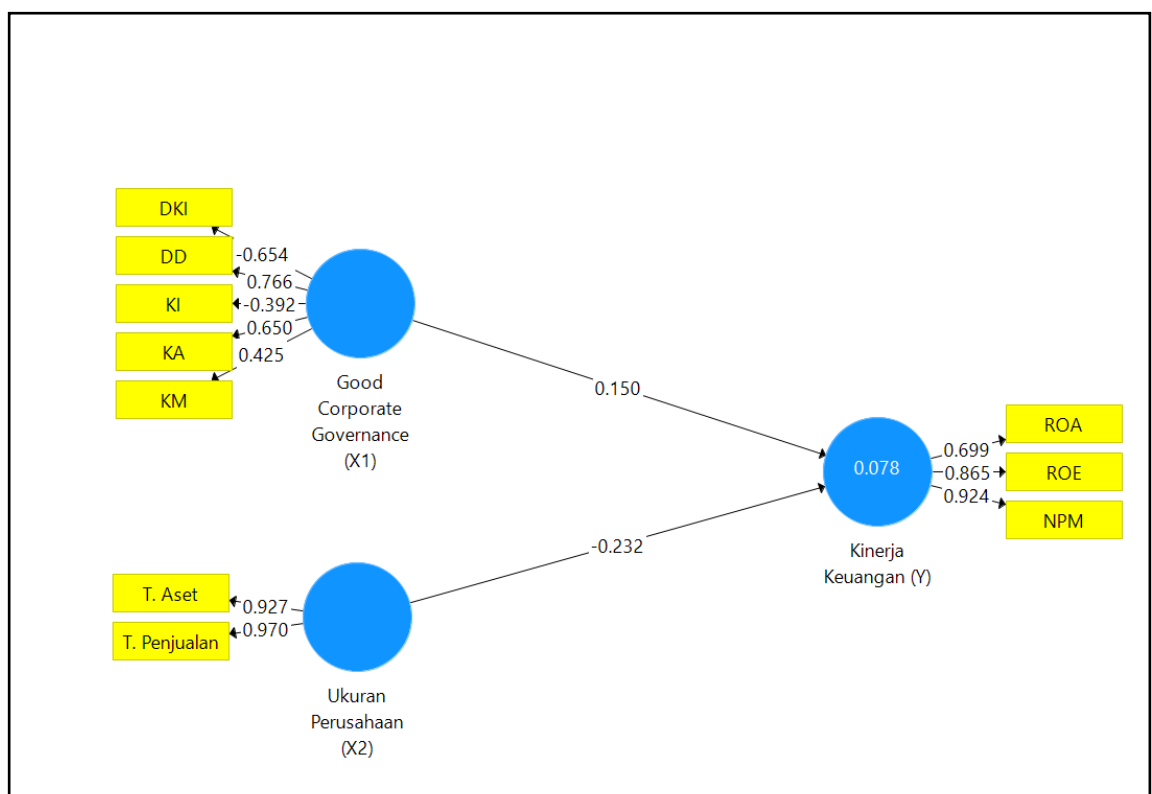
**Tabel 4.2**  
**Daftar Sampel Penelitian**

No	Kode Emiten	Nama Perusahaan
1	BBCA	Bank Central Asia Tbk
2	BBKP	Bank KB Bukopin Tbk
3	BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
4	BBRI	Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk
5	BBTN	Bank Tabungan Negara Tbk
6	BJBR	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
7	BJTM	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
8	BMRI	Bank Mandiri (persero)Tbk
9	BNGA	Bank CIMB Niaga Tbk
10	BNLI	Bank Permata Tbk
11	BSIM	Bank Sinarmas Tbk
12	BVIC	Bank Victoria International Tbk
13	NISP	Bank OCBC NISP Tbk
14	BANK	Bank Aladin Syariah Tbk
15	BRIS	Bank Syariah Indonesia Tbk
16	BTPS	Bank BTPN Syariah Tbk
17	PNBS	Bank Panin Syariah Tbk

Sumber : [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) (data diolah)

#### 4.1.2 Hasil Pengujian *Outer Model*

Nilai *loading factor* atau disebut juga indikator pada setiap konstruk. *Convergent validity* untuk pengukuran model reflektif dilihat dari nilai korelasi item *score* dengan menggunakan SmartPLS Versi 3. Nilai pada pengukuran reflektif individual harus mempunyai nilai korelasi diatas 0.5 dari pengukuran konstruk. Berikut hasil output *loading factor* sebagai berikut:



Sumber: Hasil Data Olahan

**Gambar 4.2**  
**Full Model Struktural**

**Tabel 4.3**  
**Hasil Nilai *Loading Factor***

Indikator	Nilai <i>Loading Factor</i>	Keterangan
DKI	-0.654	Tidak valid
DD	0.766	Valid
KI	0.392	Tidak valid
KA	0.650	Valid
KM	0.425	Tidak valid
Total Aset	0.927	Valid
Total Penjualan	0.970	Valid

*Sumber: Hasil Data Olahan*

#### 4.1.2.1 Hasil Pengujian Validitas Konvergen

Berdasarkan gambar dan tabel diatas dapat diketahui bahwa variabel *Good Corporate Governance* untuk indikator DKI memiliki nilai *loading factor* (-0.654), untuk indikator DD memiliki nilai *loading factor* (0.766), untuk indikator KI memiliki *nilai loading factor* (0.392), untuk indikator KA memiliki nilai *loading factor* (0.650) dan untuk indikator KM memiliki *nilai loading factor* (0.425).

Dalam variabel ukuran perusahaan nilai *loading factor* untuk indikator Total Aset menghasilkan *loading factor* (0.927) dan untuk indikator Total Penjualan memiliki nilai *loading factor* (0.970). Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian ini menandakan bahwa Dewan Direksi dan Komite Audit dikatakan valid dalam mengukur variabel *Good*

*Corporate Governance* dan Total Aset dan Total Penjualan dikatakan valid dalam mengukur variabel Ukuran Perusahaon.

#### 4.1.2.2 Hasil Pengujian Validitas Diskriminan

Setelah pengujian validitas konstruk, maka selanjutnya dilakukan pengujian validitas diskriminan menggunakan *cross correlation* dengan kriteria bahwa apabila nilai *loading factor* dalam satu variabel yang bersesuaian lebih besar dari nilai korelasi indikator pada variabel lainnya maka indikator tersebut dinyatakan valid dalam mengukur variabel yang bersesuaian. Hasil perhitungan *Cross Loadings* disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.4**  
**Hasil Cross Loadings**

Indikator	GCG (X <sub>1</sub> )	Kinerja Keuangan (Y)	Ukuran Perusahaan (X <sub>2</sub> )
DD	0.766	0.116	0.147
DKI	-0.654	-0.120	0.071
KA	0.650	0.088	-0.203
KI	-0.392	-0.019	-0.155
KM	0.425	-0.002	-0.280
ROA	0.160	0.699	-0.061
ROE	0.165	0.865	-0.105
NPM	0.105	0.924	-0.137
Total Aset	-0.100	-0.168	0.927
Total Penjualan	0.025	-0.261	0.970

Sumber: Hasil Data Olahan

Suatu indikator dinyatakan valid jika mempunyai *loading factor* tertinggi kepada konstruk yang dituju dibandingkan *loading factor* kepada konstruk lain. Tabel di atas menunjukkan bahwa *loading factor* untuk indikator DD mempunyai *loading factor* kepada konstruk GCG lebih tinggi dari pada dengan konstruk yang lain. Hal serupa juga tampak pada indikator-indikator yang lain. Dengan demikian, indikator DKI dari variabel GCG menunjukkan hasil lebih baik dibandingkan dengan indikator yang lain.

#### 4.1.2.3 Hasil Pengujian *Average Variance Extracted* (AVE)

Metode lain untuk melihat *discriminant validity* adalah dengan melihat *Average Variance Extracted* (AVE). Nilai yang disarankan adalah di atas 0,5. Berikut adalah nilai AVE dalam penelitian ini:

**Tabel 4.5**  
***Average Variance Extracted* (AVE)**

	<b>Average VarianceExtracted (AVE)</b>
<i>Good Corporate Governance</i>	0.355
Kinerja keuangan	0.697
Ukuran Perusahaan	0.900

*Sumber: Hasil Data Olahan*

Berdasarkan tabel di atas nilai pada perhitungan *Average Variance Extracted* (AVE) yaitu uji data yang dilakukan untuk mengetahui korelasi dari masing-masing nilai variabel. Syarat untuk validitas variabel dari nilai AVE

harus diatas 0.5. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa yang variabel Kinerja Keuangan dan ukuran perusahaan yang memenuhi syarat.

#### 4.1.2.4 Hasil Pengujian Reliabilitas

##### a. Hasil Pengujian *Composite Reliability*

Menurut Sarstedt, dkk (2017) menjelaskan bahwa nilai untuk *composite reliability* diatas 0.7 akan menunjukkan nilai yang baik. Uji reabilitas dilakukan dengan melihat nilai *composite reliability* dari indikator yang mengukur konstruknya. Berikut adalah nilai *composite reliability* pada *output*:

**Tabel 4.6**  
***Composite Reliability***

Variabel	<i>Composite Reliability</i>
<i>Good Corporate Governance</i>	0.164
Kinerja Keuangan	0.872
Ukuran Perusahaan	0.947

*Sumber: Hasil Data Olahan*

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan dan kinerja keuangan yang memenuhi tingkat reliabilitas dan validitas yang baik.

##### b. Hasil Pengujian *Cronbachs Alpha*

Uji reliabilitas juga bisa diperkuat dengan *Cronbachs Alpha* di mana *output* memberikan hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.7**  
***Cronbachs Alpha***

Variabel	<i>Cronbachs Alpha</i>
<i>Good Corporate Governance</i>	-0.046
Kinerja Keuangan	0.795
Ukuran Perusahaan	0.894

*Sumber: Hasil Data Olahan*

Nilai untuk *Cronbachs Alpha* adalah di atas 0.6 dan berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa variable ukuran perusahaan dan kinerja keuangan yang memiliki nilai diatas 0.6 untuk *Cronbachs Alpha*.

#### **4.1.3 Hasil Pengujian *Inner Model***

Setelah model yang diestimasi memenuhi kriteria *Outer Model*, berikutnya dilakukan pengujian model *structural (Inner model)*. Nilai *R-square* menjelaskan variasi antara variabel independen terhadap variabel dependennya. Berikut adalah nilai *R-Square* pada konstruk:

**Tabel 4.8**  
**Hasil *R-square***

	<b><i>R-square</i></b>	<b>Keterangan</b>
Kinerja Keuangan	0.078	Lemah

*Sumber: Hasil Data Olahan*

Dengan hasil *R-square* sebesar 0.078 menunjukkan bahwa variabilitas pada konstruk kinerja keuangan yang dijelaskan oleh konstruk GCG dan ukuran perusahaan menunjukkan interaksi sebesar 7%. Artinya variabel terikat pada *inner model* mengidentifikasi model yang lemah, sedangkan faktor lainnya yaitu 93% dijelaskan oleh variabel diluar yang

diteliti. Berdasarkan hasil diatas menyatakan bahwa kekuatan yang dihasilkan dari nilai *R-Square* bersifat model lemah. Parameter pengaruh yang diestimasi akan memberikan informasi terkait hubungan antar variabel penelitian.

Untuk melihat hasil uji hipotesis mengacu pada hasil pengujian *path coefficient* dengan menggunakan prosedur *bootstrapping*. Hasil *path coefficient* sebagai berikut:

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Path Coefficients**

Hipotesis	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standar Deviation (STDEV)</i>	<i>T-Statistic (O/STDEV)</i>	<i>P-Value</i>
GCG->Kinerja Keuangan	0.150	0.003	0.287	0.522	0.602
Ukuran Perusahaan -> Kinerja Keuangan	-0.232	-0.249	0.111	2.093	0.037

*Sumber: Hasil Data Olahan*

**Tabel 5.0**  
**Hasil Koefisien Jalur Model Struktural**

Hipotesis	<i>Original Sample (O)</i>	<i>T-Statistic (O/STDEV)</i>	<i>P-Value</i>	Keterangan
GCG->Kinerja Keuangan	0.150	0.522	0.602	Tidak Signifikan
Ukuran Perusahaan -> Kinerja Keuangan	-0.232	2.093	0.037	Signifikan



## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan**

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 5.0 diperoleh bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini terlihat dari koefisien jalur yang bertanda positif sebesar 0.150 dengan nilai p value 0.650. Dengan demikian GCG berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan sebesar 0.150 yang berarti setiap ada kenaikan GCG maka juga akan menaikkan kinerja keuangan.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Bukhori (2012) dalam penelitiannya terkait pengaruh penerapan GCG dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI 2010 menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara mekanisme internal GCG terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian lain Fitriyani (2021) mengatakan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

### **4.2.2 Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan**

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 5.0 diperoleh ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini terlihat dari koefisien jalur yang bertanda negatif sebesar -0.232 dengan nilai p value 0.032. Dengan demikian ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan sebesar -0.232 yang berarti jika ukuran perusahaan turun maka juga akan menaikkan kinerja keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Tisna dan Agustami (2016) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja keuangan pada perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021. Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel GCG tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa pada pelaksanaan GCG dengan indikator dewan komisaris independen dalam menjalankan fungsi monitoring terhadap perusahaan kurang berjalan optimal dikarenakan sedikitnya anggota dewan komisaris di perbankan syariah. Indikator dewan direksi yang besar dengan menyebabkan beberapa kekurangan ataupun masalah diantaranya dalam menjalankan kegiatan internal perusahaan semakin tidak terkendali karena akan terjadi masalah dalam hal komunikasi dan koordinasi yang kurang efektif. Indikator kepemilikan institusional harus mempertajam potensi para manajemen dalam menemukan potensi kecurangan yang dapat merugikan perusahaan.

Indikator Komite audit menunjukkan bahwa jumlah komite audit tidak menjamin pelaksanaan keefektifan kinerja komite audit dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja keuangan perusahaan Indikator kepemilikan manajerial dapat meratakann kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Manajer akan merasakan langsung manfaat dari setiap keputusan yang

diambilnya begitu pula bila terjadi kesalahan maka manajer akan bertanggung jawab atas kerugian sebagai konsekuensi dari kepemilikan saham. Indikator DPS yang merangkap jabatan kepada dewan direksi juga belum maksimal dikarenakan jumlah dewan pengawas syariah di perbankan syariah dengan jumlah sedikit tidak bisa dalam peningkatan pengawasan di kegiatan perusahaan.

2. Variabel Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan. Hal ini disebabkan oleh total aset di dalam perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021 mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian tersebut, maka peneliti menyampaikan beberapa saran untuk dapat menjadi masukan atas penelitian ini.

Adapun saran tersebut sebagai berikut:

- a. Bagi Akademi

Disarankan untuk memberikan kontribusi dan menjadikan tambahan referensi atau sumber dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

- b. Bagi investor

Disarankan melakukan pengamatan analisis yang cermat dalam menentukan saham yang akan dibeli. Investor diharapkan agar selalu berhati-hati dalam melakukan investasi pada perusahaan yang belum menerapkan

GCG. Investor juga diharapkan memperhatikan penerapan GCG didalam suatu perusahaan dalam menentukan pilihan yang tepat dalam berinvestasi. Investor diharapkan harus bijak dalam memutuskan investasi di suatu perusahaan dan memperhatikan pelaksanaan GCG pada perusahaan perbankan syariah karena dengan terlaksananya GCG berarti hak investor terlindungi.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Disarankan penelitian selanjutnya mengambil sampel perusahaan pada sektor yang berbeda dan jumlah sampel banyak sehingga menghasilkan informasi yang mendukung. Variabel yang digunakan dapat ditambah dengan variabel-variabel lain di luar variabel yang telah digunakan dalam penelitian ini sehingga dapat lebih menambah pemahaman mengenai *Good Corporate Governance* dan variabel lain mempengaruhi hubungan dengan variabel dependen agar hasil *inner* model yang digunakan dapat menjelaskan dengan kuat mempengaruhi variabel dependen. Penelitian selanjutnya sebaiknya dapat menggunakan rancangan penelitian yang lebih kompleks dengan memasukkan variabel *moderating*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agasva, Bagas Andrean, dan Harry Budiantoro. 2020. “**Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2014-2017).**” JEBA (Journal of Economics and Business Aseanomics) 5(1). doi: 10.33476/j.e.b.a.v5i1.1403.
- Aisyiah, Nurul., Darminto., Husaini, Achmad. 2013. “**Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan Menggunakan Metode Rasio Keuangan Dan Metode Eva (*Economic Value Added*) (Studi Pada Pt. Kalbe Farma Tbk Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2011)**”. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 2 No. 1 Mei 2013.
- Aliyaturosyida. 2021. “**Pengaruh *Good Corporate Governance*, Struktur Modal dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor Pertambangan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017-2019**”. Undergraduate thesis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Ananda, Nova Adhtiya. 2017. Pengaruh Profitabilitas Dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. JEBI Vol. 02, No. 01, pp. 25-31.
- Andriani Tisna, G., & Agustami, S. 2016. “**Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2010-2014)**”. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan,4(2),1035–1046. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i2.4038>.
- Anandamaya, L.P.V. 2021. “**Pengaruh *Good Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan**”. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi.
- Andelline, S., dan Widjaja, I. 2018. “**Pengaruh *Working Capital Turnover*, Total Asset Turnover, Asset Growth Dan Sales Growth Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Consumer Goods Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Selama Tahun 2013-2016**”. Jurnal Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan, 2(2).
- Ardana, Yudhistira. 2019. “**Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Mengukur Risiko Dan Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Indonesia**”. Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 4, No. 1, 2019.

- Arisandi, N.D., Astika, I.B.P. 2019. **“Pengaruh Tingkat Utang, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Manajerial pada Persistensi Laba”**. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 26.3.
- Bastian, I. 2010. **“Akuntansi Sektor Publik”**: Suatu Pengantar. Erlangga. Jakarta.
- Bukhoiri. 2012. **“Pengaruh Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI (2010))”**. Ejournal-s1.undip.ac.id.
- Cadbury Committee. 1992. **“Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance”**. London: Gee.
- Candradewi, Intan., dan Sedana., Ida Bagus Panji. 2016. **“Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional Dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Return On Asset”**. E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 5, No. 5, 2016: 3163 – 3190.
- Darminto, D. P. (2019). **“Analisis Laporan Keuangan Konsep Dan Aplikasi (Keempat)”**. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn
- Dewinigrat, Ayu Indira., Mustanda, I Ketut. 2018. **“PENGARUH LIKUIDITAS, PROFITABILITAS, PERTUMBUHAN PENJUALAN, DAN STRUKTUR ASET TERHADAP STRUKTUR MODAL**. E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 7, No. 7, 2018: 3471-3501.
- Efendi., dan Dalesna. 2021. **“The Effect Of Inventory Turn Over, Fixed Asset Turn Over, Return On Fixed Asset, Andreturn On Equity On Financial Performance Regional Public Services Agencies”**. JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING & MANAGEMENT RESEARCH. Vol. 2 No. 1: February 2021.
- Sunarwan, Eko. 2015. **“Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah”**. Skripsi Sarjana. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Fahmi, Irham. 2014. **“Manajemen Keuangan Perusahaan dan Pasar Modal”**. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Fahmi, Irham. 2017. **“Analisis Laporan Keuangan Bandung”**: Alfabeta.
- Fitriyani, Yuniar 2021. **“Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Subsektor Perbankan Yang Terdaftar di BEI”**. AKUNTABEL 18 (4), 2021 703-712.

- Ghozali, Imam. 2011. "**Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS**". Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam., dan Latan, Hengki. 2014." *Partial Least Squares: Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS3.0 edisi kedua*". Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ghozali, Imam., dan Latan, Hengki. 2015. "*Partial Least Square Konsep, Teknik dan Aplikasi menggunakan program smartPLS 3.0*". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair J.F. et.al (1995), "**Multivariate Data Analysis With Reading**", Fourth Edition, Prentice Hall. New Jersey.
- Hair, Joseph F. Jr et al. (2014). "*A Primer On Partial Least Squares Structural Equation Modelling (PLS SEM)*". SAGE Publications. Inc. California. USA.
- Halim, Abdul. 2014. "**Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik**". Jakarta: Salemba Empat.
- Hanafi, Mamduh. M., Halim, Abdul. 2016. "**Analisis Laporan Keuangan Edisi ke 5**". Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hantono. (2018). "**Konsep Analisa Laporan Keuangan dengan Pendekatan Rasio dan SPSS**". Sleman: CV. Budi Utama.
- Harianto, S. 2017. "**Rasio Keuangan dan Pengaruhnya terhadap Profitabilitas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**". Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen 7(1): 41-48
- Heriyani, D.N., Hernawati, Erna & Ermaya, H.N.L. 2021. "**Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan**". Prosiding Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi. Volume 2, 2021.
- Hery. 2015. "**Pengantar Akuntansi**". Jakarta: PT Grasindo.
- Hery. 2017. "**Analisis Laporan Keuangan (Intergrated and Comprehensive edition)**". Jakarta: Grasindo.
- Indrasari, M. (2017). "**Kepuasan Kerja dan Kinerja Karyawan: Tinjauan dari Dimensi Iklim Organisasi, Kreativitas Individu, dan Karakteristik Pekerjaan**". Sidoarjo: Indomedia Pustaka.



- Jimminder, Fahmi, M. 2019. **“Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2017”**. In Jurnal Bisnis dan Ekonomi (Vol. 1, Issue 2).
- Jumingan. 2017. **“Analisis Laporan Keuangan”**. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Kasmir. 2014. **“Analisis Laporan Keuangan”**. Dalam E. 1, Cetakan Ketujuh. Jakarta: Rajawali Pers.
- . 2017. **“Analisis laporan keuangan (edisi satu, cetakan kesepuluh)”**. Jakarta: Rajawali Pers.
- . 2018. **“Manajemen sumber daya manusia (teori dan praktik)”**. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- . 2019. **“Analisis Laporan Keuangan”**. Edisi Pertama. Cetakan Keduabelas. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2019. **“Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia”**.
- Krishnamurti, C., & Velayutham, E. 2018. **“The influence of board committee structures on voluntary disclosure of greenhouse gas emissions: Australian evidence”**. Pacific-Basin Finance Journal, 50, 65-81.
- Maharani, Zana Eksantia. 2018. **“Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Property dan Real Estate Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017”**. Skripsi. Universitas Islam Indonesia.
- Maulana, Ilham. 2020, **“Analisis Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Perusahaan Jasa Keuangan Di Indonesia”**. Jurnal REKSA Rekayasa Keuangan Syariah dan Audit, Vol. 07, No. 01, 2020, pp. 11-23.
- Oktavia, Vivi., Jefri, Ulfi., & Kusuma, J.W. 2020. **“Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance(Pada Perusahaan properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2018)”**. Jurnal Revenue, Vol. 01, No. 02, Desember 2020 p-ISSN : 2723-6498 e-ISSN: 2723-6501.
- Pering, I Made Anom Arya. (2021). **“Kajian Analisis Jalur Dengan Structural Equation Modeling (Sem) Smart-Pls 3.0”**. Jurnal Satyagraha, Vol. 03, No. 02, Agustus 2020 – Januari 2021, ISSN: 2620-6358
- Pratama, Lupi., dan Sihan, Minahase. 2021. **“Pengaruh Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Sektor**

- Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019**". Volume 1 (2), 2021.
- Putri, Seviana Widia., Ramadhan, Yanuar. (2020). **"Pengaruh Kebijakan Dividen, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai Perusahaan"**. JCA Ekonomi, Volume 1 Nomor 1 Januari - Juni 2020.
- Ramadhani, Fendi Hudaya. 2017. **"Pengaruh Debt To Equity Ratio (Der), Return On Equity (Roe), Dan Net Profit Margin (Npm) Terhadap Harga Saham Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015"**. 2 Jurnal Profita Edisi 8 Tahun 2017.
- Riadiani, Ajeng R., dan Agus Wahyudin. 2015. **"Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Manajemen Laba dengan Financial Distress sebagai intervening"**. Universitas Negeri Semarang.
- Rudianto. 2013. **"Akuntansi Manajemen Informasi untuk Pengambilan Keputusan Strategis"**. Jakarta: Erlangga.
- Rudangga, I. G. N. G, dan G. M. Sudiarta. 2016. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan. E-Jurnal Manajemen 5(7): 4394-4422
- Ruroh, I. N., dan S. W. Latifah. 2018. **"Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Risk Minimization Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2015-2016)"**. Jurnal Akademi Akuntansi 1(1): 42-53
- Rusliyawati, R., Putri, T. M., & Darwis, D. 2021. **"Penerapan Metode Garis Lurus dalam Sistem Informasi Akuntansi Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap pada PO Puspa Jaya"**. Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Akuntansi, 1(1), 1–13.
- Sanjaya, S., dan Rizky, M.F. 2018. **"Analisis Profitabilitas dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada PT. Taspen (Persero)"**. KITABAH, 2 No 2"
- Santoso, Singgih. 2014. **"Konsep Dasar dan Aplikasi SEM dengan AMOS 22"**. Jakarta: Kompas Gramedia, Anggota KAPI.
- Sari, Ni Made. W., Sukadana, I Wayan., Widnyana, I Wayan. 2020. **"Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia"**. Vol 2 Nomor 1 Januari 2021.

- Sarstedt, M., Ringle, C.M., dan Hair, J.M. 2017. “**Partial Least Square Structural Equation Modeling**”. Dalam: Homburg C., Klarmann, M. Vomberg A (eds) *Handbook Of Marketing Research*. Springer, Cham.
- Sawir, Agnes. 2015. “**Analisis Kinerja dan Perencanaan Keuangan Perusahaan**”. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Sawitri, N. M. Y., Wahyuni, M. A., & Yuniarta, G. A. 2017. “**Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan, dan Struktur Kepemilikan Terhadap (Studi Empiris pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2012-2015)**”. *EJournal Universitas Pendidikan Ganesha*, 7(1), 1–12.
- Sholihin, Mahfud dan Ratmono, Dwi. 2013. “**Analisis SEM-PLS dengan Wrap-PLS 3.0 Untuk Hubungan Nonlinear dalam Penelitian Sosial dan Bisnis**”. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Sintyawati, Ni Luh Ary., Dewi, Made Nurmala. 2018. " **Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Leverage Terhadap Biaya Keagenan Pada Perusahaan Manufaktur**". *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 7, No. 2, 2018: 933-1020
- Sitepu, Debby Purnama sari. 2019. “**Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia**”. Skripsi. Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- Sufriani., Rimawan. M. 2020. “**Analisis Return on Equity dan Debt to Equity Ratio**”. Volume 4 Nomor 2, Agustus 2020.
- Sugiyono. 2019. “**Metode Penelitian Kuantitatif**”. Alfabeta.
- Sutedi, Adrian. 2012.”**Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya**”. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafrida Hani, 2014. “**Teknik Analisa Laporan Keuangan**”. Penerbit In Media, Medan.
- Timm, N.H . 2002. “**Applied Multivariate Analysis**”. New York: Springer-verlag.
- Tsauri, S. (2014). “**Manajemen Kinerja: Performance Management**”. Jember: STAIN jember Press.
- Tunggal, Amin Widjaja. 2012. “**Audit kecurangan dan akuntansi forensik**”. Harvarindo, Jakarta.
- Wahyuni, Ni Ketut Sri., Sukartha, I Made. 2019. “**Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan Pada Kinerja Keuangan**”

**Perusahaan Perbankan**". E-JA: E JURNAL AKUNTANSI VOL 29 NO 1 OKTOBER 2019 HLMN. 390-404.

Wahyuni, T., Ernawati, E & Murhadi, R. W. (2013). "**Faktor-Faktor yang mempengaruhi Nilai Perusahaan di Sektor Property, Real Estate, & Building Construction yang Terdaftar di BEI Periode 2008-2012**". Calyptra, 2013.

Widyaningsih, Dewi. 2018. "**Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Serta Komite Audit Pada Nilai Perusahaan Dengan Pengungkapan CSR sebagai Variabel Moderating dan Firm Size sebagai Variabel Kontrol**". Jurnal Akuntansi dan Pajak, 19(01), 2018, 38-52.

Widyati, M. F. (2013). Pengaruh Dewan Direksi, Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan. Jurnal Ilmu Manajemen. Volume 1 Nomor 1. Januari 2013.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/115034/pmk-no-88-pmk062015>.

**Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bawah Pembinaan Dan Pengawasan Menteri Keuangan.** Jakarta. Diakses pada tanggal 02 Juni 2022 Pukul 16.43 WIB.

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2008-tentang-perbankan-syariah.aspx>. **Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.** Jakarta. Diakses pada tanggal 02 Juni 2022 Pukul 16.49 WIB.

<https://jdih.bumn.go.id/lihat/KEP-117/M-MBU/2002>. **Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).** Jakarta. Diakses pada tanggal 02 Juni 2022 Pukul 17.09 WIB.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43919>. **Undang-undang Nomor 19 tentang Badan Usaha Milik Negara.** Jakarta. Diakses pada tanggal 02 Juni 2022 Pukul 17.33 WIB.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/137576/peraturan-bi-no-1133pbi2009>. **Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.** Jakarta. Diakses pada tanggal 02 Juni 2022 Pukul 17.46 WIB.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39965>. **Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.** Jakarta. Diakses tanggal 02 Juni 2022 Pukul 17.49 WIB.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43919>. **Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.** Jakarta. Diakses pada tanggal 02 Juni 2022 Pukul 17.53 WIB.

**Lampiran 1 : Daftar Perbankan Di BEI Tahun 2017-2021**

<b>No</b>	<b>Kode Emiten</b>	<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Tanggal IPO</b>
1	AGRO	Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	08/08/2003
2	AGRS	Bank IBK Indonesia Tbk	22/12/2014
3	AMAR	Bank Amar Indonesia Tbk	09/01/2020
4	ARTO	Bank Jago Tbk	12/01/2016
5	BABP	Bank MNC Internasional Tbk	15/07/2002
6	BACA	Bank Capital Indonesia Tbk	04/10/2007
7	BANK	Bank Aladin Syariah Tbk	01/02/2021
8	BBCA	Bank Central Asia Tbk	31/05/2000
9	BBHI	Allo Bank Indonesia Tbk	12/08/2015
10	BBKP	Bank KB Bukopin Tbk	10/07/2006
11	BBMD	Bank Mestika Dharma Tbk	08/07/2013
12	BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	25/11/1996
13	BBRI	Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk	10/11/2003
14	BBSI	Bank Bisnis Internasional Tbk	07/09/2020
15	BBTN	Bank Tabungan Negara Tbk	17/12/2009
16	BBYB	Bank Neo Commerce Tbk	13/01/2001
17	BCIC	Bank JTrust Indonesia Tbk	25/06/1997
18	BDMN	Bank Danamon Indonesia Tbk	06/12/1989
19	BEKS	Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	13/07/2001
20	BGTG	Bank Ganesha Tbk	12/05/2016

21	BINA	Bank Ina Perdana Tbk	16/01/2014
22	BJBR	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	08/07/2010
23	BJTM	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	12/07/2012
24	BKSW	Bank QNB Indonesia Tbk	21/11/2002
25	BMAS	Bank Maspion Indonesia Tbk	11/07/2003
26	BMRI	Bank Mandiri (persero)Tbk	14/07/2003
27	BNBA	Bank Bumi Arta Tbk	31/11/1999
28	BNGA	Bank CIMB Niaga Tbk	29/11/1989
29	BNII	Bank Maybank Indonesia Tbk	21/11/1989
30	BNLI	Bank Permata Tbk	15/07/1990
31	BRIS	Bank Syariah Indonesia Tbk	09/05/2018
32	BSIM	Bank Sinarmas Tbk	13/12/2010
33	BSWD	Bank of India Indonesia Tbk	01/05/2002
34	BTPN	Bank BTPN Tbk	12/03/2008
35	BTPS	Bank BTPN Syariah Tbk	08/05/2018
36	BVIC	Bank Victoria International Tbk	30/06/1999
37	DNAR	Bank Oke Indonesia Tbk	11/07/2014
38	INPC	Bank Artha Graha Internasional Tbk	29/8/1990
39	MASB	Bank Multiarta Sentosa Tbk	30/06/2021
40	MAYA	Bank Mayapada Internasional Tbk	29/08/1997
41	MCOR	Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	03/072007

42	MEGA	Bank Mega Tbk	17/04/2000
43	NISP	Bank OCBC NISP Tbk	20/10/1994
44	NOBU	Bank Nationainobu Tbk	20/05/2013
45	PNBN	Bank Pan Indonesia Tbk	29/12/1982
46	PNBS	Bank Panin Dubai Syariah Tbk	15/01/2014
47	SDRA	Bank Woori Saudara Indonesia 1960 Tbk	15/12 2006



**Lampiran 2: Sampel Penelitian**

No	Nama Emiten	2017	2018	2019	2020	2021
1	BBCA- Bank Central Asia Tbk	√	√	√	√	√
2	BBKP- Bank KB Bukopin Tbk	√	√	√	√	√
3	BBNI- Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	√	√	√	√	√
4	BBRI- Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk	√	√	√	√	√
5	BBTN- Bank Tabungan Negara Tbk	√	√	√	√	√
6	BJBR- Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	√	√	√	√	√
7	BJTM- Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	√	√	√	√	√
8	BMRI- Bank Mandiri (persero)Tbk	√	√	√	√	√
9	BNGA- Bank CIMB Niaga Tbk	√	√	√	√	√
10	BNLI- Bank Permata Tbk	√	√	√	√	√

11	BSIM- Bank Sinarmas Tbk	√	√	√	√	√
12	BVIC- Bank Victoria International Tbk	√	√	√	√	√
13	NISP- Bank OCBC NISP Tbk	√	√	√	√	√
14	BANK – Bank Aladin Syariah Tbk	√	√	√	√	√
15	BRIS- Bank Syariah Indonesia Tbk	√	√	√	√	√
16	BTPS- Bank BTPN Syariah Tbk	√	√	√	√	√
17	PNBS- Bank Panis Dubai Syariah Tbk	√	√	√	√	√

### Lampiran 3 Tabulasi Data

#### Dewan Komisaris Independen (X1.1)

No	Kode Emiten	Tahun	Jumlah Anggota DKI	Total Dewan Komisaris	DKI
1	BBCA	2017	3	5	0.6
		2018	3	5	0.6
		2019	3	5	0.6
		2020	3	5	0.6
		2021	3	5	0.6
2	BBKP	2017	4	7	0.571
		2018	4	8	0.5
		2019	4	8	0.5
		2020	4	8	0.5
		2021	5	8	0.625
3	BBNI	2017	4	8	0.5
		2018	5	9	0.556
		2019	5	8	0.625
		2020	6	10	0.6
		2021	7	10	0.7
4	BBRI	2017	5	11	0.4545
		2018	5	10	0.5
		2019	5	11	0.4545
		2020	6	12	0.5
		2021	6	12	0.5
5	BBTN	2017	5	8	0.625
		2018	5	9	0.5556
		2019	3	6	0.5
		2020	3	6	0.5
		2021	4	7	0.571
6	BJBR	2017	4	5	0.8
		2018	1	2	0.5
		2019	3	5	0.6
		2020	3	5	0.6
		2021	3	5	0.6
7	BJTM	2017	2	5	0.4
		2018	2	4	0.5
		2019	3	6	0.5
		2020	3	6	0.5

		2021	2	3	0.667
8	BMRI	2017	4	8	0.5
		2018	4	8	0.5
		2019	4	8	0.5
		2020	5	10	0.5
		2021	5	10	0.5
9	BNGA	2017	4	9	0.4444
		2018	4	9	0.4444
		2019	4	9	0.4444
		2020	5	8	0.625
		2021	3	7	0.4286
10	BNLI	2017	4	9	0.4444
		2018	4	9	0.4444
		2019	4	9	0.4444
		2020	5	8	0.625
		2021	3	7	0.429
11	BSIM	2017	2	3	0.667
		2018	2	3	0.667
		2019	2	3	0.667
		2020	2	3	0.667
		2021	2	3	0.667
12	BVIC	2017	2	3	0.667
		2018	2	3	0.667
		2019	2	3	0.667
		2020	2	3	0.667
		2021	3	3	1
13	NISP	2017	5	8	0.625
		2018	5	8	0.625
		2019	6	9	0.667
		2020	6	8	0.75
		2021	5	8	0.625
14	BANK	2017	2	3	0.667
		2018	2	3	0.667
		2019	2	3	0.667
		2020	3	4	0.75
		2021	3	4	0.75
15	BRIS	2017	2	4	0.5
		2018	2	4	0.5
		2019	2	4	0.5
		2020	4	2	2

		2021	5	9	0.556
16	BTPS	2017	1	4	0.25
		2018	1	4	0.25
		2019	2	4	0.5
		2020	2	4	0.5
		2021	2	4	0.5
17	PNBS	2017	2	4	0.5
		2018	2	3	0.667
		2019	2	3	0.667
		2020	2	3	0.667
		2021	2	3	0.667

**Dewan Direksi (X1.2)**

<b>No</b>	<b>Kode Emiten</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Anggota Dewan Direksi</b>
1	BBCA	2017	12
		2018	11
		2019	11
		2020	12
		2021	12
2	BBKP	2017	9
		2018	10
		2019	10
		2020	11
		2021	11
3	BBNI	2017	12
		2018	13
		2019	13
		2020	14
		2021	14
4	BBRI	2017	11
		2018	14
		2019	14
		2020	13
		2021	12
5	BBTN	2017	11
		2018	12
		2019	11
		2020	10
		2021	12
6	BJBR	2017	7
		2018	4
		2019	6
		2020	7
		2021	7
7	BJTM	2017	7
		2018	7
		2019	5
		2020	5
		2021	5

8	BMRI	2017	10
		2018	11
		2019	12
		2020	12
		2021	12
9	BNGA	2017	14
		2018	15
		2019	14
		2020	15
		2021	13
10	BNLI	2017	11
		2018	10
		2019	10
		2020	11
		2021	11
11	BSIM	2017	8
		2018	8
		2019	8
		2020	8
		2021	8
12	BVIC	2017	7
		2018	8
		2019	6
		2020	6
		2021	8
13	NISP	2017	12
		2018	11
		2019	11
		2020	12
		2021	12
14	BANK	2017	6
		2018	5
		2019	5
		2020	7
		2021	9
15	BRIS	2017	7
		2018	6
		2019	7
		2020	7
		2021	14

16	BTPS	2017	7
		2018	7
		2019	7
		2020	6
		2021	8
17	PNBS	2017	5
		2018	5
		2019	5
		2020	5
		2021	5



**Kepemilikan Institusional**

No	Kode Emiten	Tahun	Jumlah Saham Konstitusional	Jumlah Saham Beredar	KI
1	BBCA	2017	10,627,241,435	24,655,010,000	0.431
		2018	10,627,069,539	24,655,010,000	0.431
		2019	10,629,094,089	24,655,010,000	0.431
		2020	11,064,345,538	24,655,010,000	0.449
		2021	55,326,331,790	123,275,050,000	0.449
2	BBKP	2017	2,725,986,130	9,086,620,432	0.3
		2018	2,725,986,130	11,651,908,748	0.234
		2019	2,725,986,130	11,651,908,748	0.234
		2020	3,816,380,581	32,673,251,194	0.117
		2021	45,484,861,813	67,887,540,178	0.67
3	BBNI	2017	7,111,909,538	18,648,656,458	0.381
		2018	6,975,708,080	18,648,656,458	0.374
		2019	6,746,267,407	18,648,656,458	0.362
		2020	5,120,493,979	18,629,076,758	0.275
		2021	5,410,892,073	18,623,973,858	0.291
4	BBRI	2017	70,000,000,000	122,237,220,000	0.573
		2018	70,000,000,000	122,237,220,000	0.573
		2019	70,000,000,000	122,237,220,000	0.573
		2020	70,000,000,000	122,380,635,500	0.572
		2021	80,610,976,876	122,595,346,500	0.658

5	BBTN	2017	6,354,000,000	10,590,000,000	0.6
		2018	6,354,000,000	10,590,000,000	0.6
		2019	6,354,000,000	10,590,000,000	0.6
		2020	6,354,000,000	10,590,000,000	0.6
		2021	6,354,000,000	10,590,000,000	0.6
6	BJBR	2017	7,272,218,666	9,696,291,166	0.75
		2018	7,414,714,661	9,696,291,166	0.765
		2019	7,414,714,661	9,696,291,166	0.765
		2020	7,414,714,661	9,696,291,166	0.765
		2021	7,414,714,661	9,838,787,161	0.754
7	BJTM	2017	11,934,147,982	14,974,591,382	0.797
		2018	11,934,147,982	14,974,813,498	0.797
		2019	11,934,147,982	15,002,370,582	0.795
		2020	11,934,147,982	15,015,498,082	0.795
		2021	11,934,147,982	15,015,498,082	0.795
8	BMRI	2017	15,015,498,082	46,666,666,666	0.322
		2018	18,662,338,708	46,666,666,666	0.400
		2019	18,657,404,908	46,666,666,666	0.400
		2020	18,619,855,966	46,666,666,666	0.399
		2021	18,617,961,166	46,666,666,666	0.399
9	BNGA	2017	22,991,336,581	24,937,199,351	0.922
		2018	22,991,336,581	24,933,338,455	0.922

		2019	22,991,336,581	24,929,895,141	0.922
		2020	22,991,336,581	24,927,657,094	0.922
		2021	22,991,336,581	24,929,713,961	0.922
10	BNLI	2017	24,991,428,332	28,042,739,205	0.891
		2018	24,991,428,332	28,042,739,205	0.891
		2019	28,042,739,205	28,042,739,205	1
		2020	28,042,739,205	28,042,739,205	1
		2021	35,715,192,701	36,181,312,782	0.987
11	BSIM	2017	36,181,312,782	15,381,803,066	2.352
		2018	10,136,240,671	15,381,803,266	0.659
		2019	10,649,201,846	16,981,803,206	0.627
		2020	10,760,936,114	17,461,803,306	0.616
		2021	10,760,936,114	17,461,803,306	0.616
12	BVIC	2017	6,147,478,029	8,671,048,162	0.709
		2018	6,576,662,079	8,671,048,162	0.758
		2019	6,857,560,956	8,951,947,039	0.766
		2020	6,808,768,556	8,951,947,039	0.761
		2021	6,842,901,446	10,487,132,568	0.653
13	NISP	2017	9,760,695,612	11,472,648,486	0.851
		2018	19,521,391,224	22,945,296,972	0.851
		2019	19,521,391,224	22,945,296,972	0.851
		2020	19,521,391,224	22,945,296,972	0.851

		2021	19,521,391,224	22,945,296,972	0.851
14	BANK	2017	945,069	945,069	1
		2018	945,069	945,069	1
		2019	945,069	945,069	1
		2020	8,193,072,560	8,193,072,560	1
		2021	7,988,245,746	13,241,354,364	0.603
15	BRIS	2017	3,958,000,000	3,958,000,000	1
		2018	7,935,308,555	9,716,113,498	0.817
		2019	7,935,308,555	9,716,113,498	0.817
		2020	7,909,907,655	9,900,508,698	0.799
		2021	38,602,604,400	41,129,307,343	0.939
16	BTPS	2017	6,933,330,000	6,933,330,000	1
		2018	6,162,960,000	7,703,700,000	0.8
		2019	5,392,590,000	7,701,200,000	0.700
		2020	5,679,208,330	7,701,200,000	0.737
		2021	5,392,590,000	7,701,602,800	0.700
17	PNBS	2017	7,555,778,690	10,195,335,256	0.741
		2018	22,030,796,875	23,959,037,851	0.920
		2019	22,030,796,875	23,959,037,851	0.920
		2020	36,884,251,004	38,813,641,319	0.950
		2021	35,853,751,004	38,813,641,319	0.924

**Komite Audit**

<b>No</b>	<b>Kode Emiten</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Anggota Dewan Direksi</b>
1	BBCA	2017	3
		2018	3
		2019	3
		2020	3
		2021	3
2	BBKP	2017	5
		2018	6
		2019	6
		2020	7
		2021	7
3	BBNI	2017	4
		2018	4
		2019	4
		2020	5
		2021	5
4	BBRI	2017	6
		2018	6
		2019	9
		2020	4
		2021	8
5	BBTN	2017	6
		2018	6
		2019	4
		2020	4
		2021	5
6	BJBR	2017	4
		2018	4
		2019	4
		2020	4
		2021	3
7	BJTM	2017	5
		2018	4
		2019	4
		2020	4
		2021	4

8	BMRI	2017	6
		2018	6
		2019	7
		2020	7
		2021	7
9	BNGA	2017	4
		2018	4
		2019	4
		2020	6
		2021	3
10	BNLI	2017	3
		2018	4
		2019	4
		2020	4
		2021	4
11	BSIM	2017	3
		2018	3
		2019	3
		2020	3
		2021	3
12	BVIC	2017	5
		2018	4
		2019	3
		2020	5
		2021	4
13	NISP	2017	3
		2018	4
		2019	4
		2020	4
		2021	4
14	BANK	2017	4
		2018	4
		2019	4
		2020	4
		2021	3
15	BRIS	2017	5
		2018	6
		2019	5
		2020	5
		2021	10

16	BTPS	2017	4
		2018	4
		2019	4
		2020	3
		2021	4
17	PNBS	2017	3
		2018	3
		2019	3
		2020	3
		2021	3

**Kepemilikan Manajerial (X1.5)**

No	Kode Emiten	Tahun	Saham Yang Dimiliki Manajer dan Dewan Direksi	Jumlah Saham Beredar	KM
1	BBCA	2017	14,027,768,561	24,655,010,000	0.569
		2018	14,027,940,461	24,655,010,000	0.569
		2019	14,025,915,911	24,655,010,000	0.569
		2020	13,620,664,462	24,655,010,000	0.552
		2021	67,948,718,210	123,275,050,000	0.551
2	BBKP	2017	1,951,088	9,086,620,432	0.0002
		2018	433,495	11,651,908,748	3.72
		2019	433,495	11,651,908,748	3.72
		2020	220,495	32,673,251,194	6.74
		2021	3,822	67,887,540,178	5.63
3	BBNI	2017	3,937,500	18,648,656,458	0.0002
		2018	5,743,300	18,648,656,458	0.0003
		2019	5,743,300	18,648,656,458	0.0003
		2020	13,828,400	18,629,076,758	0.0007
		2021	17,686,911	18,623,973,858	0.0009
4	BBRI	2017	1,625	122,237,220,000	1.329
		2018	3,561,200	122,237,220,000	2.913
		2019	9,111	122,237,220,000	7.454
		2020	1,442,200	122,380,635,500	1.178
		2021	5,244,300	122,595,346,500	4.278



5	BBTN	2017	-	10,590,000,000	0
		2018	-	10,590,000,000	0
		2019	1,897,176	10,590,000,000	0.0002
		2020	6,192,426	10,590,000,000	0.0006
		2021	-	10,590,000,000	0
6	BJBR	2017	11,556,100	9,696,291,166	0.0012
		2018	14,363,900	9,696,291,166	0.0015
		2019	6,672,666	9,696,291,166	0.0007
		2020	6,067,766	9,696,291,166	0.0006
		2021	8,630,566	9,838,787,161	0.0009
7	BJTM	2017	4,215,658	14,974,591,382	0.0003
		2018	4,327,958	14,974,813,498	0.0003
		2019	9,261,758	15,002,370,582	0.0006
		2020	11,625,700	15,015,498,082	0.0008
		2021	13,305,500	15,015,498,082	0.0009
8	BMRI	2017	6,181,581	46,666,666,666	0.0001
		2018	8,496,181	46,666,666,666	0.0002
		2019	8,302,481	46,666,666,666	0.0002
		2020	7,713,087	46,666,666,666	0.0002
		2021	1,931,230	46,666,666,666	4.138
9	BNGA	2017	-	24,937,199,351	0
		2018	-	24,933,338,455	0

		2019	-	24,929,895,141	0
		2020	-	24,927,657,094	0
		2021	-	24,929,713,961	0
10	BNLI	2017	1,229,598	28,042,739,205	3.385
		2018	1,228,596	28,042,739,205	4.381
		2019	1,067,446	28,042,739,205	3.806
		2020	1,067,446	28,042,739,205	3.806
		2021	-	36,181,312,782	0
11	BSIM	2017	-	15,381,803,066	0
		2018	-	15,381,803,266	0
		2019	-	16,981,803,206	0
		2020	-	17,461,803,306	0
		2021	-	17,461,803,306	0
12	BVIC	2017	1,079,181	8,671,048,162	0.0001
		2018	3,674,362	8,671,048,162	0.0004
		2019	3,966,362	8,951,947,039	0.0004
		2020	4,222,362	8,951,947,039	0.0005
		2021	4,586,362	10,487,132,568	0.0004
13	NISP	2017	-	11,472,648,486	0
		2018	-	22,945,296,972	0
		2019	-	22,945,296,972	0
		2020	-	22,945,296,972	0

		2021	-	22,945,296,972	0
14	BANK	2017	-	945,069	0
		2018	-	945,069	0
		2019	-	945,069	0
		2020	21,733,400	8,193,072,560	0.002
		2021	-	13,241,354,364	0
15	BRIS	2017	-	3,958,000,000	0
		2018	-	9,716,113,498	0
		2019	-	9,716,113,498	0
		2020	-	9,900,508,698	0
		2021	-	41,129,307,343	0
16	BTPS	2017	-	6,933,330,000	0
		2018	-	7,703,700,000	0
		2019	-	7,701,200,000	0
		2020	-	7,701,200,000	0
		2021	-	7,701,602,800	0
17	PNBS	2017	-	10,195,335,256	0
		2018	-	23,959,037,851	0
		2019	-	23,959,037,851	0
		2020	-	38,813,641,319	0
		2021	-	38,813,641,319	0

**Total Aset (X2.1)**

No	Kode Emiten	Tahun	Total Aset	Total Ln Aset
1	BBCA	2017	750,319,671,000,000	14.875
		2018	824,787,944,000,000	14.916
		2019	918,989,312,000,000	14.963
		2020	1,075,570,256,000,000	15.032
		2021	1,228,344,680,000,000	15.089
2	BBKP	2017	106,442,999,000,000	14.027
		2018	95,643,923,000,000	13.981
		2019	100,264,248,000,000	14.001
		2020	79,938,578,000,000	13.903
		2021	89,215,674,000,000	13.950
3	BBNI	2017	709,330,084,000,000	14.851
		2018	808,572,011,000,000	14.908
		2019	845,605,208,000,000	14.927
		2020	891,337,425,000,000	14.950
		2021	964,037,692,000,000	14.984
4	BBRI	2017	1,126,248,442,000,000	15.052
		2018	1,296,898,292,000,000	15.113
		2019	1,416,758,840,000,000	15.151
		2020	1,511,804,628,000,000	15.179
		2021	1,678,097,734,000,000	15.225

5	BBTN	2017	261,365,267,000,000	14.417
		2018	306,436,194,000,000	14.486
		2019	311,776,828,000,000	14.494
		2020	361,208,406,000,000	14.558
		2021	371,868,311,000,000	14.570
6	BJBR	2017	114,980,168,000,000	14.061
		2018	120,191,387,000,000	14.080
		2019	123,536,474,000,000	14.092
		2020	140,934,002,000,000	14.149
		2021	158,356,097,000,000	14.200
7	BJTM	2017	51,518,681,000,000	13.712
		2018	62,689,118,000,000	13.797
		2019	76,715,290,000,000	13.885
		2020	83,619,452,000,000	13.922
		2021	83,619,452,000,000	13.922
8	BMRI	2017	1,124,708,847,000,000	15.051
		2018	1,202,252,094,000,000	15.080
		2019	1,318,246,335,000,000	15.120
		2020	1,429,334,484,000,000	15.155
		2021	1,725,611,128,000,000	15.237
9	BNGA	2017	266,305,445,000,000	14.425
		2018	266,781,498,000,000	14.426

		2019	274,467,227,000,000	14.438
		2020	280,943,605,000,000	14.449
		2021	310,786,960,000,000	14.492
10	<b>BNLI</b>	2017	148,328,370,000,000	14.171
		2018	152,892,866,000,000	14.184
		2019	161,451,259,000,000	14.208
		2020	197,726,097,000,000	14.296
		2021	234,379,042,000,000	14.370
11	<b>BSIM</b>	2017	30,404,078,000,000	13.483
		2018	30,748,742,000,000	13.488
		2019	36,559,556,000,000	13.563
		2020	44,612,045,000,000	13.649
		2021	52,671,981,000,000	13.722
12	<b>BVIC</b>	2017	28,825,608,648,000	13.460
		2018	30,172,315,337,000	13.480
		2019	30,456,458,802,000	13.484
		2020	26,221,407,472,000	13.419
		2021	24,947,143,045,000	13.397
13	<b>NISP</b>	2017	153,773,957,000,000	14.187
		2018	173,582,894,000,000	14.240
		2019	180,706,987,000,000	14.257
		2020	206,297,200,000,000	14.314

		2021	214,395,608,000,000	14.331
14	BANK	2017	1,275,648,000,000	12.106
		2018	661,912,000,000	11.821
		2019	715,623,000,000	11.855
		2020	721,397,000,000	11.858
		2021	2,173,162,000,000	12.337
15	BRIS	2017	31,543,384,000,000	13.499
		2018	37,915,048,000,000	13.579
		2019	43,123,488,000,000	13.635
		2020	57,715,586,000,000	13.761
		2021	265,289,081,000,000	14.424
16	BTPS	2017	9,156,522,000,000	12.962
		2018	12,039,275,000,000	13.081
		2019	15,383,038,000,000	13.187
		2020	16,435,005,000,000	13.216
		2021	18,543,856,000,000	13.268
17	PNBS	2017	8,629,275,047,000,000	15.936
		2018	8,771,057,795,000,000	15.943
		2019	11,135,824,845,000,000	16.047
		2020	218,067,091,000,000	14.339
		2021	211,287,370,000,000	14.325

**Total Penjualan (X2.2)**

No	Kode Emiten	Tahun	Total Penjualan	Total Ln Penjualan
1	BBKA	2017	41,826,474,000,000	13.621
		2018	45,290,545,000,000	13.656
		2019	50,477,448,000,000	13.703
		2020	54,161,270,000,000	13.734
		2021	56,135,575,000,000	13.749
2	BBKP	2017	3,133,312,000,000	12.496
		2018	2,593,143,000,000	12.414
		2019	2,014,539,000,000	12.304
		2020	552,056,000,000	11.742
		2021	829,517,000,000	11.919
3	BBNI	2017	31,937,763,000,000	13.504
		2018	35,446,315,000,000	13.550
		2019	36,602,374,000,000	13.564
		2020	37,151,966,000,000	13.570
		2021	38,246,731,000,000	13.583
4	BBRI	2017	27,410,236,580,000,000	16.438
		2018	25,042,133,377,000,000	16.399
		2019	24,349,908,881,000,000	16.386
		2020	25,122,295,869,000,000	16.400
		2021	114,094,429,000,000	14.057
5	BBTN	2017	9,340,940,000,000	12.970



		2018	10,089,177,000,000	13.004
		2019	8,961,801,000,000	12.952
		2020	8,913,843,000,000	12.950
		2021	7,900,527,000,000	12.898
6	BJBR	2017	6,292,855,000,000	12.799
		2018	6,499,031,000,000	12.813
		2019	6,082,506,000,000	12.784
		2020	6,497,264,000,000	12.813
		2021	158,356,097,000,000	14.200
7	BJTM	2017	3,484,912,000,000	12.542
		2018	3,688,107,000,000	12.567
		2019	3,999,601,000,000	12.602
		2020	4,057,270,000,000	12.608
		2021	4,677,681,000,000	12.670
8	BMRI	2017	51,988,361,000,000	13.716
		2018	54,622,632,000,000	13.737
		2019	59,440,188,000,000	13.774
		2020	56,508,129,000,000	13.752
		2021	73,062,494,000,000	13.864
9	BNGA	2017	12,403,379,000,000	13.094
		2018	12,011,731,000,000	13.080
		2019	12,568,018,000,000	13.099

		2020	12,470,518,000,000	13.096
		2021	13,088,860,000,000	13.117
10	BNLI	2017	5,224,226,000,000	12.718
		2018	5,400,185,000,000	12.732
		2019	5,720,968,000,000	12.757
		2020	6,541,790,000,000	12.816
		2021	7,649,653,000,000	12.884
11	BSIM	2017	1,925,212,000,000	12.284
		2018	2,165,942,000,000	12.336
		2019	2,210,503,000,000	12.344
		2020	2,188,204,000,000	12.340
		2021	2,415,797,000,000	12.383
12	BVIC	2017	457,677,104,000	11.661
		2018	459,330,574,000	11.662
		2019	269,148,219,000,000	14.430
		2020	189,658,449,000	11.278
		2021	463,654,216,000	11.666
13	NISP	2017	6,039,255,000,000	12.781
		2018	6,377,935,000,000	12.805
		2019	6,438,932,000,000	12.809
		2020	6,826,556,000,000	12.834
		2021	7,643,485,000,000	12.883

14	BANK	2017	104,274,000,000	11.018
		2018	61,445,000,000	10.788
		2019	51,471,000,000	10.712
		2020	31,277,000,000	10.495
		2021	36,111,000,000	10.558
15	BRIS	2017	2,816,524,000,000	12.450
		2018	3,120,307,000,000	12.494
		2019	3,374,863,000,000	12.528
		2020	4,347,121,000,000	12.638
		2021	17,808,432,000,000	13.251
16	BTPS	2017	7,046,000,000	9.848
		2018	13,149,000,000	10.119
		2019	17,742,000,000	10.249
		2020	21,893,000,000	10.340
		2021	22,332,000,000	10.349
17	PNBS	2017	8,650,954,000,000	12.937
		2018	8,964,494,000,000	12.953
		2019	8,968,876,000,000	12.953
		2020	8,806,989,000,000	12.945
		2021	9,555,208,000,000	12.980

**ROA (Y1.1)**

No	Kode Emiten	Tahun	Laba Bersih	Total Aset	ROA
1	BBCA	2017	23,321,150,000,000	750,319,671,000,000	0.031
		2018	25,851,660,000,000	824,787,944,000,000	0.031
		2019	28,569,974,000,000	918,989,312,000,000	0.031
		2020	27,147,109,000,000	1,075,570,256,000,000	0.025
		2021	31,440,159,000,000	1,228,344,680,000,000	0.026
2	BBKP	2017	135,901,000,000	106,442,999,000,000	0.001
		2018	189,970,000,000	95,643,923,000,000	0.002
		2019	216,749,000,000	100,264,248,000,000	0.002
		2020	(3,258,109,000,000)	79,938,578,000,000	-0.041
		2021	(2,302,279,000,000)	89,215,674,000,000	-0.026
3	BBNI	2017	13,770,592,000,000	709,330,084,000,000	0.019
		2018	15,091,763,000,000	808,572,011,000,000	0.019
		2019	15,508,583,000,000	845,605,208,000,000	0.018
		2020	3,321,442,000,000	891,337,425,000,000	0.004
		2021	10,977,051,000,000	964,037,692,000,000	0.011
4	BBRI	2017	29,044,334,000,000	1,126,248,442,000,000	0.026
		2018	32,418,486,000,000	1,296,898,292,000,000	0.025
		2019	34,413,825,000,000	1,416,758,840,000,000	0.024
		2020	18,660,393,000,000	1,511,804,628,000,000	0.012
		2021	30,755,766,000,000	1,678,097,734,000,000	0.018

5	BBTN	2017	3,027,466,000,000	261,365,267,000,000	0.012
		2018	2,807,923,000,000	306,436,194,000,000	0.009
		2019	209,263,000,000	311,776,828,000,000	0.001
		2020	1,602,358,000,000	361,208,406,000,000	0.004
		2021	2,376,227,000,000	371,868,311,000,000	0.006
6	BJBR	2017	1,211,405,000,000	114,980,168,000,000	0.011
		2018	1,552,396,000,000	120,191,387,000,000	0.013
		2019	1,564,492,000,000	123,536,474,000,000	0.013
		2020	1,689,996,000,000	140,934,002,000,000	0.012
		2021	2,018,654,000,000	158,356,097,000,000	0.013
7	BJTM	2017	1,159,370,000,000	51,518,681,000,000	0.023
		2018	1,260,308,000,000	62,689,118,000,000	0.020
		2019	1,376,505,000,000	76,715,290,000,000	0.018
		2020	1,488,962,000,000	83,619,452,000,000	0.018
		2021	1,523,870,000,000	83,619,452,000,000	0.018
8	BMRI	2017	21,443,042,000,000	1,124,708,847,000,000	0.019
		2018	25,851,937,000,000	1,202,252,094,000,000	0.022
		2019	28,445,592,000,000	1,318,246,335,000,000	0.022
		2020	17,645,624,000,000	1,429,334,484,000,000	0.012
		2021	30,551,097,000,000	1,725,611,128,000,000	0.018
9	BNGA	2017	2,977,738,000,000	266,305,445,000,000	0.011
		2018	3,482,428,000,000	266,781,498,000,000	0.013

		2019	3,642,935,000,000	274,467,227,000,000	0.013
		2020	2,022,254,000,000	280,943,605,000,000	0.007
		2021	4,098,604,000,000	310,786,960,000,000	0.013
10	<b>BNLI</b>	2017	748,433,000,000	148,328,370,000,000	0.005
		2018	901,252,000,000	152,892,866,000,000	0.006
		2019	1,500,420,000,000	161,451,259,000,000	0.009
		2020	721,587,000,000	197,726,097,000,000	0.004
		2021	1,231,127,000,000	234,379,042,000,000	0.005
11	<b>BSIM</b>	2017	318,923,000,000	30,404,078,000,000	0.010
		2018	50,472,000,000	30,748,742,000,000	0.002
		2019	6,752,000,000	36,559,556,000,000	0.000
		2020	118,522,000,000	44,612,045,000,000	0.003
		2021	127,748,000,000	52,671,981,000,000	0.002
12	<b>BVIC</b>	2017	136,090,761,000	28,825,608,648,000	0.005
		2018	79,081,921,000	30,172,315,337,000	0.003
		2019	(13,764,500,000)	30,456,458,802,000	-0.0005
		2020	(252,193,690,000)	26,221,407,472,000	-0.010
		2021	(119,063,497,000)	24,947,143,045,000	-0.005
13	<b>NISP</b>	2017	2,175,824,000,000	153,773,957,000,000	0.014
		2018	2,638,064,000,000	173,582,894,000,000	0.015
		2019	2,939,243,000,000	180,706,987,000,000	0.016
		2020	2,101,671,000,000	206,297,200,000,000	0.010

		2021	2,519,619,000,000	214,395,608,000,000	0.012
14	BANK	2017	(9,785,000,000)	1,275,648,000,000	-0.008
		2018	(64,700,000,000)	661,912,000,000	-0.098
		2019	77,304,000,000	715,623,000,000	0.108
		2020	44,868,000,000	721,397,000,000	0.062
		2021	(121,275,000,000)	2,173,162,000,000	-0.056
15	BRIS	2017	101,091,000,000	31,543,384,000,000	0.003
		2018	106,600,000,000	37,915,048,000,000	0.003
		2019	74,016,000,000	43,123,488,000,000	0.002
		2020	248,054,000,000	57,715,586,000,000	0.004
		2021	3,028,205,000,000	265,289,081,000,000	0.011
16	BTPS	2017	670,182,000,000	9,156,522,000,000	0.073
		2018	965,311,000,000	12,039,275,000,000	0.080
		2019	1,399,634,000,000	15,383,038,000,000	0.091
		2020	854,614,000,000	16,435,005,000,000	0.052
		2021	1,465,005,000,000	18,543,856,000,000	0.079
17	PNBS	2017	(968,851,297,000,000.)	8,629,275,047,000,000	-0.112
		2018	20,788,229,000,000	8,771,057,795,000,000	0.002
		2019	13,237,011,000,000	11,135,824,845,000,000	0.001
		2020	128,116,000,000	218,067,091,000,000	0.0006
		2021	(818,112,377,000,000)	211,287,370,000,000	-3.872

**ROE (Y1.2)**

No	Kode Emiten	Tahun	Laba Bersih	Total Ekuitas	ROE
1	BBCA	2017	23,321,150,000,000	131,401,694,000,000	0.177
		2018	25,851,660,000,000	151,753,427,000,000	0.170
		2019	28,569,974,000,000	174,143,156,000,000	0.164
		2020	27,147,109,000,000	184,714,709,000,000	0.147
		2021	31,440,159,000,000	202,848,934,000,000	0.155
2	BBKP	2017	135,901,000,000	6,758,952,000,000	0.020
		2018	189,970,000,000	8,594,437,000,000	0.022
		2019	216,749,000,000	8,905,485,000,000	0.024
		2020	(3,258,109,000,000)	8,466,442,000,000	-0.385
		2021	(2,302,279,000,000)	13,205,904,000,000	-0.174
3	BBNI	2017	13,770,592,000,000	100,903,304,000,000	0.136
		2018	15,091,763,000,000	110,373,789,000,000	0.137
		2019	15,508,583,000,000	125,003,948,000,000	0.124
		2020	3,321,442,000,000	112,872,199,000,000	0.029
		2021	10,977,051,000,000	126,519,977,000,000	0.087
4	BBRI	2017	29,044,334,000,000	168,007,778,000,000	0.173
		2018	32,418,486,000,000	185,275,331,000,000	0.175
		2019	34,413,825,000,000	208,784,336,000,000	0.165
		2020	18,660,393,000,000	199,911,376,000,000	0.093
		2021	30,755,766,000,000	291,786,804,000,000	0.105



5	BBTN	2017	3,027,466,000,000	21,663,434,000,000	0.140
		2018	2,807,923,000,000	23,840,448,000,000	0.118
		2019	209,263,000,000	23,836,195,000,000	0.009
		2020	1,602,358,000,000	19,987,845,000,000	0.080
		2021	2,376,227,000,000	21,406,647,000,000	0.111
6	BJBR	2017	1,211,405,000,000	10,104,975,000,000	0.120
		2018	1,552,396,000,000	11,285,315,000,000	0.138
		2019	1,564,492,000,000	12,042,629,000,000	0.130
		2020	1,689,996,000,000	12,005,800,000,000	0.141
		2021	2,018,654,000,000	13,084,033,000,000	0.154
7	BJTM	2017	1,159,370,000,000	7,816,074,000,000	0.148
		2018	1,260,308,000,000	8,471,936,000,000	0.149
		2019	1,376,505,000,000	9,021,558,000,000	0.153
		2020	1,488,962,000,000	10,004,950,000,000	0.149
		2021	1,523,870,000,000	10,910,539,000,000	0.140
8	BMRI	2017	21,443,042,000,000	170,006,132,000,000	0.126
		2018	25,851,937,000,000	184,960,305,000,000	0.140
		2019	28,445,592,000,000	209,034,525,000,000	0.136
		2020	17,645,624,000,000	193,796,083,000,000	0.091
		2021	30,551,097,000,000	222,111,282,000,000	0.138
9	BNGA	2017	2,977,738,000,000	36,950,996,000,000	0.081
		2018	3,482,428,000,000	39,580,579,000,000	0.088

		2019	3,642,935,000,000	43,294,166,000,000	0.084
		2020	2,022,254,000,000	41,053,051,000,000	0.049
		2021	4,098,604,000,000	43,388,358,000,000	0.094
10	<b>BNLI</b>	2017	748,433,000,000	21,510,742,000,000	0.035
		2018	901,252,000,000	22,451,936,000,000	0.040
		2019	1,500,420,000,000	24,037,351,000,000	0.062
		2020	721,587,000,000	35,071,453,000,000	0.021
		2021	1,231,127,000,000	36,613,715,000,000	0.034
11	<b>BSIM</b>	2017	318,923,000,000	4,844,184,000,000	0.066
		2018	50,472,000,000	4,856,420,000,000	0.010
		2019	6,752,000,000	6,074,463,000,000	0.001
		2020	118,522,000,000	6,056,844,000,000	0.020
		2021	127,748,000,000	7,359,416,000,000	0.017
12	<b>BVIC</b>	2017	136,090,761,000	2,846,345,796,000	0.048
		2018	79,081,921,000	2,806,025,405,000	0.028
		2019	(13,764,500,000)	2,986,454,603,000	-0.0046
		2020	(252,193,690,000)	2,644,375,254,000	-0.095
		2021	(119,063,497,000)	3,014,425,174,000	-0.039
13	<b>NISP</b>	2017	2,175,824,000,000	21,784,354,000,000	0.100
		2018	2,638,064,000,000	24,428,254,000,000	0.108
		2019	2,939,243,000,000	27,664,803,000,000	0.106
		2020	2,101,671,000,000	29,829,316,000,000	0.070

		2021	2,519,619,000,000	32,327,571,000,000	0.078
14	BANK	2017	(9,785,000,000)	583,650,000,000	-0.017
		2018	(64,700,000,000)	530,263,000,000	-0.122
		2019	77,304,000,000	595,717,000,000	0.130
		2020	44,868,000,000	641,274,000,000	0.070
		2021	(121,275,000,000)	1,046,327,000,000	-0.116
15	BRIS	2017	101,091,000,000	2,602,841,000,000	0.039
		2018	106,600,000,000	5,026,640,000,000	0.021
		2019	74,016,000,000	5,088,036,000,000	0.015
		2020	248,054,000,000	5,444,288,000,000	0.046
		2021	3,028,205,000,000	25,013,934,000,000	0.121
16	BTPS	2017	670,182,000,000	2,254,646,000,000	0.297
		2018	965,311,000,000	3,996,932,000,000	0.242
		2019	1,399,634,000,000	5,393,320,000,000	0.260
		2020	854,614,000,000	5,878,749,000,000	0.145
		2021	1,465,005,000,000	7,094,900,000,000	0.206
17	PNBS	2017	(968,851,297,000,000)	36,288,731,000,000	-26.698
		2018	20,788,229,000,000	40,747,117,000,000	0.510
		2019	13,237,011,000,000	44,441,714,000,000	0.298
		2020	128,116,000,000	47,460,332,000,000	0.003
		2021	(818,112,377,000,000)	48,547,747,000,000	-16.852

**NPM (Y1.3)**

No	Kode Emiten	Tahun	Laba Bersih	Penjualan Bersih	NPM
1	BBCA	2017	23,321,150,000,000	41,826,474,000,000	0.558
		2018	25,851,660,000,000	45,290,545,000,000	0.571
		2019	28,569,974,000,000	50,477,448,000,000	0.566
		2020	27,147,109,000,000	54,161,270,000,000	0.501
		2021	31,440,159,000,000	56,135,575,000,000	0.560
2	BBKP	2017	135,901,000,000	3,133,312,000,000	0.043
		2018	189,970,000,000	2,593,143,000,000	0.073
		2019	216,749,000,000	2,014,539,000,000	0.108
		2020	(3,258,109,000,000)	552,056,000,000	-5.902
		2021	(2,302,279,000,000)	829,517,000,000	-2.775
3	BBNI	2017	13,770,592,000,000	31,937,763,000,000	0.431
		2018	15,091,763,000,000	35,446,315,000,000	0.426
		2019	15,508,583,000,000	36,602,374,000,000	0.424
		2020	3,321,442,000,000	37,151,966,000,000	0.089
		2021	10,977,051,000,000	38,246,731,000,000	0.287
4	BBRI	2017	29,044,334,000,000	27,410,236,580,000,000	0.001
		2018	32,418,486,000,000	25,042,133,377,000,000	0.001
		2019	34,413,825,000,000	24,349,908,881,000,000	0.001
		2020	18,660,393,000,000	25,122,295,869,000,000	0.001
		2021	30,755,766,000,000	114,094,429,000,000	0.270

5	BBTN	2017	3,027,466,000,000	9,340,940,000,000	0.324
		2018	2,807,923,000,000	10,089,177,000,000	0.278
		2019	209,263,000,000	8,961,801,000,000	0.023
		2020	1,602,358,000,000	8,913,843,000,000	0.180
		2021	2,376,227,000,000	7,900,527,000,000	0.301
6	BJBR	2017	1,211,405,000,000	6,292,855,000,000	0.193
		2018	1,552,396,000,000	6,499,031,000,000	0.239
		2019	1,564,492,000,000	6,082,506,000,000	0.257
		2020	1,689,996,000,000	6,497,264,000,000	0.260
		2021	2,018,654,000,000	158,356,097,000,000	0.013
7	BJTM	2017	1,159,370,000,000	3,484,912,000,000	0.333
		2018	1,260,308,000,000	3,688,107,000,000	0.342
		2019	1,376,505,000,000	3,999,601,000,000	0.344
		2020	1,488,962,000,000	4,057,270,000,000	0.367
		2021	1,523,870,000,000	4,677,681,000,000	0.326
8	BMRI	2017	21,443,042,000,000	51,988,361,000,000	0.412
		2018	25,851,937,000,000	54,622,632,000,000	0.473
		2019	28,445,592,000,000	59,440,188,000,000	0.479
		2020	17,645,624,000,000	56,508,129,000,000	0.312
		2021	30,551,097,000,000	73,062,494,000,000	0.418
9	BNGA	2017	2,977,738,000,000	12,403,379,000,000	0.240
		2018	3,482,428,000,000	12,011,731,000,000	0.290

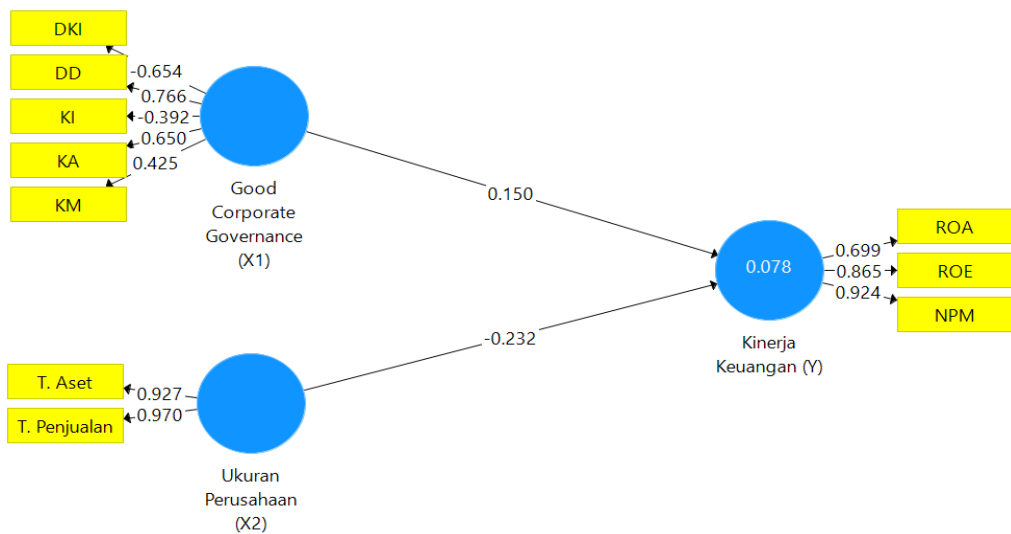
		2019	3,642,935,000,000	12,568,018,000,000	0.290
		2020	2,022,254,000,000	12,470,518,000,000	0.162
		2021	4,098,604,000,000	13,088,860,000,000	0.313
10	BNLI	2017	748,433,000,000	5,224,226,000,000	0.143
		2018	901,252,000,000	5,400,185,000,000	0.167
		2019	1,500,420,000,000	5,720,968,000,000	0.262
		2020	721,587,000,000	6,541,790,000,000	0.110
		2021	1,231,127,000,000	7,649,653,000,000	0.161
11	BSIM	2017	318,923,000,000	1,925,212,000,000	0.166
		2018	50,472,000,000	2,165,942,000,000	0.023
		2019	6,752,000,000	2,210,503,000,000	0.003
		2020	118,522,000,000	2,188,204,000,000	0.054
		2021	127,748,000,000	2,415,797,000,000	0.053
12	BVIC	2017	136,090,761,000	457,677,104,000	0.297
		2018	79,081,921,000	459,330,574,000	0.172
		2019	(13,764,500,000)	269,148,219,000,000	-0.0001
		2020	(252,193,690,000)	189,658,449,000	-1.330
		2021	(119,063,497,000)	463,654,216,000	-0.257
13	NISP	2017	2,175,824,000,000	6,039,255,000,000	0.360
		2018	2,638,064,000,000	6,377,935,000,000	0.414
		2019	2,939,243,000,000	6,438,932,000,000	0.456
		2020	2,101,671,000,000	6,826,556,000,000	0.308

		2021	2,519,619,000,000	7,643,485,000,000	0.330
14	BANK	2017	(9,785,000,000)	104,274,000,000	-0.094
		2018	(64,700,000,000)	61,445,000,000	-1.053
		2019	77,304,000,000	51,471,000,000	1.502
		2020	44,868,000,000	31,277,000,000	1.435
		2021	(121,275,000,000)	36,111,000,000	-3.358
15	BRIS	2017	101,091,000,000	2,816,524,000,000	0.036
		2018	106,600,000,000	3,120,307,000,000	0.034
		2019	74,016,000,000	3,374,863,000,000	0.022
		2020	248,054,000,000	4,347,121,000,000	0.057
		2021	3,028,205,000,000	17,808,432,000,000	0.170
16	BTPS	2017	670,182,000,000	7,046,000,000	95.115
		2018	965,311,000,000	13,149,000,000	73.413
		2019	1,399,634,000,000	17,742,000,000	78.888
		2020	854,614,000,000	21,893,000,000	39.036
		2021	1,465,005,000,000	22,332,000,000	65.601
17	PNBS	2017	(968,851,297,000,000)	8,650,954,000,000	111.994
		2018	20,788,229,000,000	8,964,494,000,000	2.319
		2019	13,237,011,000,000	8,968,876,000,000	1.476
		2020	128,116,000,000	8,806,989,000,000	0.0145
		2021	(818,112,377,000,000)	9,555,208,000,000	-85.620

**Lampiran 3: Hasil *Output Smartpls* Versi 3**

**1. Pengujian Outer Model**

**a. Uji Validitas (*Covergen Validity*)**



**Hasil *Outer Loading***

**Outer Loadings**

Matrix	Good Corporate Governance (X1)	Kinerja Keuangan (Y)	Ukuran Perusahaan (X2)
DD	0.766		
DKI	-0.654		
KA	0.650		
KI	-0.392		
KM	0.425		
NPM		0.924	
ROA		0.699	
ROE		0.865	
T. Aset			0.927
T. Penjual...			0.970



### b. Uji Validitas Diskriminan (*Discriminant Validity* dengan *Cross Loading*)

#### Discriminant Validity

	Good Corporate Governance (X1)_	Kinerja Keuangan (Y)	Ukuran Perusahaan (X2)
DD	0.766	0.116	0.147
DKI	-0.654	-0.120	0.071
KA	0.650	0.088	-0.203
KI	-0.392	-0.019	-0.155
KM	0.425	-0.002	-0.280
NPM	0.105	0.924	-0.317
ROA	0.160	0.699	-0.061
ROE	0.165	0.865	-0.105
T. Aset	-0.100	-0.168	0.927
T. Penjual...	0.025	-0.261	0.970

### c. *Average Variance Extracted (AVE)*

	Average Variance Extracted (AVE)
Good Corporate Governance (X1)_	<b>0.355</b>
Kinerja Keuangan (Y)	<b>0.697</b>
Ukuran Perusahaan (X2)	<b>0.900</b>

### d. Uji Reabilitas dengan CR dan CA

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
Good Corporate Governance (X1)_	<b>-0.046</b>	<b>0.164</b>
Kinerja Keuangan (Y)	<b>0.795</b>	<b>0.872</b>
Ukuran Perusahaan (X2)	<b>0.894</b>	<b>0.947</b>

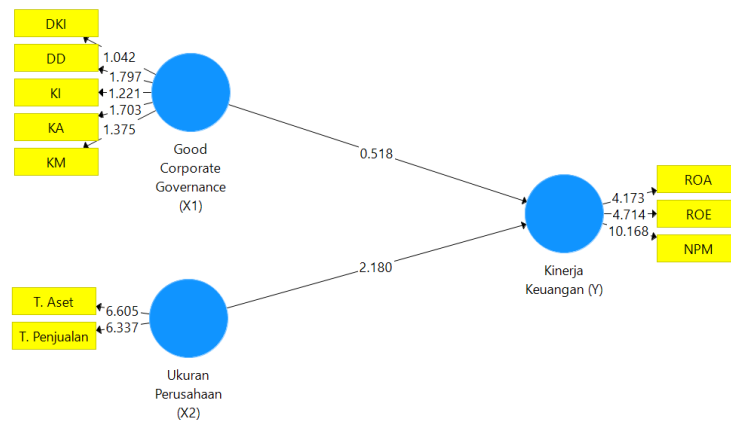
## 2. Pengujian Model Struktural (*Inner Model*)

### 1. Uji R-Square

**R Square**

Matrix	R Square	R Square Adjusted
Kinerja Keuangan (Y)	0.078	

### 2. Pengujian Hipotesis dengan *Boostrapping Calculate*



### *Path Coefficients*

**Path Coefficients**

	Original Sample ...	Sample Mean (...)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O /STDEV)	P Values
Good Corporate Governance (X1) -> Kinerja Keuangan (Y)	0.150	-0.005	0.289	0.518	<b>0.605</b>
Ukuran Perusahaan (X2) -> Kinerja Keuangan (Y)	-0.232	-0.246	0.106	2.180	<b>0.030</b>